

**PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP
PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SERTA
DAMPAKNYA TERHADAP *GOOD GOVERNANCE***

SKRIPSI



Oleh

HALIMATUR RODLIYAH

NIM : 17520025

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP
PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SERTA
DAMPAKNYA TERHADAP *GOOD GOVERNANCE***

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh

HALIMATUR RODLIYAH

NIM : 17520025

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efisiensi Penerapan Akuntansi
Sektor Publik serta Dampaknya terhadap *Good Governance*

SKRIPSI

Oleh
Halimatur Rodliyah

NIM : 17520025

Telah Disetujui Pada Tanggal 20 Juni 2023



Dosen Pembimbing,

Fatmawati Zahroh, M.S.A

NIP. 198602282019032010

LEMBAR PENGESAHAN

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efisiensi Penerapan
Akuntansi Sektor Publik serta Dampaknya terhadap *Good
Governance*
SKRIPSI

Oleh
HALIMATUR RODLIYAH

NIM : 17520025

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 16 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji:

Tanda
Tangan

1 Ketua Penguji

Novi Lailiyul Wafiroh, M.A
NIP. 199211012019032020



2 Anggota Penguji

Isnan Murdiansyah, M.S.A
NIP. 198607212019031008



3 Sekretaris Penguji

Fatmawati Zahroh, M.S.A
NIP. 198602282019032010



Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D
NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimatur Rodliyah
NIM : 17520025
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP GOOD GOVERNANCE

adalah hasil karya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 Juni 2023

Hormat saya,




Halimatur Rodliyah
NIM: 17520025

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayahnya,
yang telah memberikan ridho, kekuatan, kesabaran, cinta dan kasih
sayangsehingga dapat menyelesaikan penelitian sederhana ini. Sholawat serta
salam

selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Penelitian ini saya persembahkan untuk

keluarga tercinta yaitu Abah Imam

Sibaweh, Ibu Nanik Zubaidah,

Umma Ratna Utari Dewi,

ukhti soghir Faradisa,

serta akhi Rayhan.

Murabbiah Bunda Aliya,

Ustadzah Ria, seluruh warga Dusun Jimbir,

Akuntansi 2017, Orda IMAKA, serta Musyrif/ah Ma'had

Sunan Ampel Al-Aly

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita dapat berada pada keadaan ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang penuh dengan ilmu dan ketaqwaan.

Penulis menyampaikan rasa syukur yang tiada tara atas terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik serta dampaknya terhadap *Good Governance*” dengan harapan dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Selama proses penulisan skripsi, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu ataupun memberikan dukungan. Oleh karena itu dengan segala hormat peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H Munir, Lc., M.El selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D. selaku Kepala Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Fatmawati Zahroh, M.S.A selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, membantu dan mengarahkan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Para bapak dan ibu dosen serta staff fakultas ekonomi universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian penulisan ini.
6. Orang tua tercinta yang tidak pernah lelah ataupun bosan untuk memberikan semangat, do'a, dan nasehat agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Saudaraku yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta do'a. Semoga ilmu yang sedang kita cari saat ini dapat bermanfaat untuk keluarga serta masyarakat.
8. Bapak Camat Kuwadi, S. H dan Ibu Yantik beserta seluruh staff Kecamatan Prambon yang telah memberikan izin melakukan penelitian serta memberikan semangat untuk berani melangkah maju tanpa ragu.
9. Camat, sekcam dan seluruh staff kecamatan se-Kabupaten Nganjuk yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
10. Mudir Ma'had Alm. Kyai Muzakki dan Pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Aly yang selalu mendoakan dan mendukung musyrif-musyrifah dalam melakukan pengabdian. Semoga beliau-beliau diberikan umur yang panjang, keluarga yang harmonis serta dilimpahi keberkahan dalam

hidupnya sehingga dapat terus mendoakan dan membimbing musyri-fmusyrifah Ma'had Sunan Ampel Al-Aly.

11. Murabbiah mabna Asma' Binti Abi Bakar, Ustadzah Iqomatu Nauvi Khuluq, M. Pd, yang memberikan do'a dan semangat sejak menjadi mahasantri hingga saat ini. Semoga Alloh SWT selalu melindungi dimanapun berada.
12. Murabbiah mabna Ummu Salamah, Ustadzah Lu'lu' Ailiya Zahroh, S. Psi, dan seluruh musyrifah serta adik dampingan Ummu Salamah.
13. Tete Alfin, Teh Asya, Teh Leli, Laila, Binti, Firoh dan Almh. Teh Rifa yang sudah menularkan semangat dan memberikan contoh positif serta selalu ada ketika berada dalam keadaan sulit. Rasa syukur yang tak berhenti terucap karena telah didekatkan dengan orang-orang kuat dan hebat.
14. Keluarga kakak-kakak penghuni istana kayangan yang selalu memberikan dukungan serta dorongan untuk selalu bersemangat walaupun hari-hari yang dilalui terasa begitu berat.
15. Teman-teman seperjuanganku Diamond dan Marveluous yang selalu berbagi informasi, menularkan semangat dan perhatian serta memberikan dukungan satu sama lain.
16. Iksan Mahfudzo, Rizky Hibatulloh, selaku teman seperbimbingan yang selalu memberikan dukungan satu sama lain. Ahsan Nur Huda, Tristia Ainiyah Nurawi yang selalu bersama ketika menghadapi hari-hari yang

berat dan telah membantu banyak dalam proses penelitian hingga diselesaikan penulisan skripsi.

17. Mbak Tutus, Mbak Ulul, dan Mbak Vivit yang sudah setia menemani perjalanan penelitian dan memberikan saran atas segala keluh kesah yang dirasakan.
18. Organisasi Ikatan Mahasiswa Kota Angin (IMAKA) khususnya angkatan 2017, serta seluruh anggota ataupun alumni yang telah memberikan perhatian serta semangat untuk tetap melangkah tanpa lelah ataupun menyerah.
19. Dan semua pihak yang telah membantu secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per-satu semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan.

Dari lubuk hati yang terdalam, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan untuk meningkatkan kualitas dalam penulisan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya serta bagi pada penulis khususnya.

Nganjuk, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Kajian Teoritis.....	18
2.2.1 Teori Legitimasi (<i>Legitimacy Theory</i>)	18
2.2.2 Budaya Organisasi	20
2.2.3 Akuntansi Sektor Publik.....	22
2.2.4 Good Governance	26
2.3 Kerangka Konseptual.....	29
2.4 Hipotesis Penelitian	29
2.4.1 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik ...	30
2.4.2 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap <i>Good Governace</i>	31
2.4.3 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap <i>Good Governance</i> melalui Penerapan Akuntansi Sektor Publik	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian	34
3.3 Populasi dan Sampel.....	34
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	35
3.5 Data dan Jenis Data	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Operasional Variabel	37
3.8 Analisis Data	43
3.8.1 Analisis Deskriptif	43
3.8.2 Analisis Verifikatif.....	44
3.8.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	45
3.8.4 Uji Asumsi Klasik.....	46
3.8.5 Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	49
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif	50
4.1.3 Uji Validitas	51
4.1.4 Uji Reliabilitas	53
4.1.5 Uji Asumsi Klasik	54
4.1.5.1 Uji Multikolinieritas.....	55
4.1.5.2 Uji Heteroskedastisitas	56
4.1.6. Uji <i>Analysis Path</i> (Analisis Jalur).....	57
4.1.6.1 Hasil Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik	57
4.1.6.2 Hasil Analisis Budaya Organisasi terhadap <i>Good Governance</i> melalui Penerapan Akuntansi Sektor Publik	59
4.1.6.3 Hasil Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap <i>Good Governance</i>	61
4.2 Pembahasan Penelitian	64
4.2.1 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik ..	64
4.2.2 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap <i>Good Governance</i> melalui Penerapan Akuntansi Sektor Publik	66

4.2.3 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap <i>Good Governance</i>	67
BAB V PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
BIODATA PENELITI.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2.2 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Swasta	23
Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel	40
Tabel 4.1 Uji Validitas Budaya Organisasi (X)	51
Tabel 4.2 Uji Validitas <i>Good Governance</i> (Y)	52
Tabel 4.3 Uji Validitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik	53
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas	54
Tabel 4.5 Tabel Hasil Uji Multikolinieritas	54
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4.7 Koefisien Jalur Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik	57
Tabel 4.8 Koefisien determinasi Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik	58
Tabel 4.9 Hasil Analisis Koefisien Jalur Budaya Organisasi Terhadap <i>Good Governance</i>	59
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi Budaya Organisasi Terhadap Good Governance.....	60
Tabel 4.11 Hasil Analisis Koefisien Jalur Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap <i>Good Governance</i>	61
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap <i>Good Governance</i>	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual.....	29
Gambar 4.1 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik	59
Gambar 4.2 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap good governance	61
Gambar 4.3 Pengaruh Penerapan Akuntansi terhadap <i>Good Governance</i>	62

ABSTRAK

Rodliyah, Halimatur 2023, SKRIPSI. Judul “Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik serta Dampaknya terhadap *Good Governance*”

Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Kata Kunci : Budaya Organisasi, Akuntansi Sektor Publik, *Good Governance*

Good Governance merupakan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat menganggap bahwa tata kelola yang baik adalah yang memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance*. Prinsip tersebut diantaranya bertanggungjawab, akuntabilitas, partisipasi, berdasarkan aturan hukum, dan keadilan sosial. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penelitian ini menguji pengaruh budaya organisasi terhadap *good governance* pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tingkat Kecamatan di Kabupaten Nganjuk dengan penerapan akuntansi sektor publik sebagai variabel intervening. Sampel dari penelitian ini sebanyak 55 SKPD dengan kriteria responden sebagai camat, sekretaris camat, kasubag umum dan kasubag program evaluasi dan keuangan. Dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk, hanya 16 Kecamatan yang merespon, sedangkan 4 Kecamatan lainnya tidak merespon hingga batas waktu yang telah ditentukan yakni 2 bulan. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan analisis data serta pengujian hipotesis menggunakan Uji Analisis Jalur (*Analysis Path*) dengan bantuan aplikasi software SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Budaya Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik dengan kontribusi sebesar 30%. (2) Penerapan Akuntansi Sektor Publik mempengaruhi *good governance* secara signifikan sebesar 39%. (3) Budaya Organisasi secara langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap *Good Governance* dengan kontribusi sebesar 38% sedangkan sisanya sebesar 62% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

ABSTRACT

Rodliyah, Halimatur 2023, SKRIPSI. Judul “The influence of organizational culture on the application of public sector accounting and its impact on good governance”

Advisor : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Keywords : Organizational culture, Publik sector accounting, *Good Governance*

Good Governance is a characteristic of good governance. The community considers that good governance is one that fulfills the principles of good governance. These principles include responsibility, accountability, participation, based on the rule of law, and social justice. In accordance with Law Number 25 of 2009 concerning public services, it is a series of activities in the context of meeting the service needs of every citizen and resident for goods, services or administrative services provided by public service providers.

This study examines the effect of organizational culture on good governance at the sub-district level SKPD (Regional Work Unit) in Nganjuk Regency with the application of public sector accounting as an intervening variable. The sample of this study was 55 SKPD with the criteria of the respondents being sub-district heads, sub-district secretaries, general sub-division heads and evaluation and financial program sub-division heads. Of the 20 sub-districts in Nganjuk Regency, only 16 sub-districts responded, while the other 4 sub-districts did not respond until the predetermined time limit of 2 months. Data collection was carried out by distributing questionnaires and data analysis and hypothesis testing using the Path Analysis Test with the help of the SPSS software application

The results of this study indicate that: (1) Organizational Culture has a significant effect on the Application of Public Sector Accounting with a contribution of 30%. (2) Application of Public Sector Accounting significantly affects good governance by 39%. (3) Organizational Culture directly has a significant influence on Good Governance with a contribution of 38% while the remaining 62% is the contribution of other variables not included in this study.

مستخلص البحث

رضية، حلمة. 2023. الموضوع "تأثير الثقافة المنظمة في تطبيق محاسبة القطاع العام ثم تأثيرها على الحكم الرشيد".
المشرفة: فاطماتي زهرة، الماجستير.
الكلمة المفتاحية: الثقافة المنظمة، محاسبة القطاع العام، الحكم الرشيد.

الحكم الرشيد (*Good Governance*) هو سمة من سمات الحكم الجيد. يعتبر المجتمع أن الحكم الجيد هو ما يلبي مبادئ الحكم الرشيد (*Good Governance*). وتشمل هذه المبادئ المسؤولية والمساءلة والمشاركة القائمة على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية. وفقا للقانون رقم 25 لعام 2009 بشأن الخدمات العامة، فهي سلسلة من الأنشطة من أجل تلبية احتياجات الخدمة لكل مواطن ومقيم للسلع والخدمات أو الخدمات الإدارية التي يقدمها مقدمو الخدمات العامة.

تبحث هذه الدراسة في تأثير الثقافة التنظيمية على الحكم الرشيد في SKPD (وحدة عمل الجهاز الإقليمي) على مستوى المقاطعة الفرعية في Nganjuk Regency مع تطبيق محاسبة القطاع العام كمتغير تدخلي. كانت عينة هذه الدراسة 55 SKPD مع معايير المستجيبين كمناطق فرعية وأمناء مناطق فرعية ورؤساء عامين ورؤساء برامج التقييم والبرامج المالية. ومن بين 20 مقاطعة فرعية في مقاطعة نغانجوك، لم ترد سوى 16 مقاطعة فرعية، في حين لم تستجب المقاطعات الفرعية الـ 4 الأخرى حتى الموعد النهائي المحدد سلفا وهو شهرين. يتم جمع البيانات عن طريق توزيع الاستبيانات وتحليل البيانات وكذلك اختبار الفرضيات باستخدام اختبار تحليل المسار (*Analysis Path*) بمساعدة تطبيق برنامج SPSS.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن: (1) الثقافة التنظيمية لها تأثير معنوي على تطبيق محاسبة القطاع العام بنسبة مساهمة بلغت 30%. (2) يؤثر تطبيق محاسبة القطاع العام بشكل كبير على الحكم الرشيد بنسبة 39%. (3) الثقافة التنظيمية لها تأثير مباشر على الحكم الرشيد بمساهمة 38% في حين أن 62% المتبقية هي مساهمة متغيرات أخرى لم يتم تضمينها في هذه الدراسة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya organisasi merupakan adat atau kebiasaan yang melekat dalam suatu organisasi (Dian Ratnasari, 2018) . Kebiasaan ini dianggap pula sebagai karakteristik maupun pedoman yang diterapkan. Dalam suatu organisasi, hal ini dianggap penting karena dapat menentukan arah organisasi serta menjadi pedoman untuk mengarahkan apa yang dilakukan dan yang harus dihindari. Apabila dalam suatu organisasi tidak terdapat budaya organisasi, maka performa pada setiap anggota tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Karena semakin lama budaya organisasi itu dibentuk maka akan semakin baik pula budaya organisasinya. Budaya yang kuat didirikan oleh nilai inti dari organisasi yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik dan dirasakan bersama-sama secara luas.

Pengertian lain dari budaya organisasi ialah suatu sistem makna atau sistem nilai bersama yang ada di dalam suatu organisasi. Maka sebab itu pengaplikasian budaya organisasi dalam pemerintahan menjadi hal yang utama. Memperbaiki budaya organisasi yang ada dengan meningkatkan kepedulian serta kepedulian dilakukan untuk mewujudkan *good governance* dengan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan menganut undang-undang yang berlaku pemerintah sebagai instansi sektor publik dapat

bertanggungjawab terhadap tuntutan-tuntutan atas akuntansi sektor publik dengan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengawasi akuntabilitas pemerintah daerah meliputi akuntabilitas finansial (*finansial accountability*), akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*), akuntansi hukum (*legal accountability*), akuntabilitas publik (*public accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2014) dan diperkuat dengan penelitian oleh Priyatno dan Zanuvar (2017) bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan *good governance*. Syafrion (2015) dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap penerapan *good governance* diperoleh hasil dimana pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2015) lalu diperkuat dengan penelitian dari Maliol, Sondakh dan Gamaliel (2017) bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* (Sari, 2012).

Good governance akan terwujud ketika aparatur pemerintah menggunakan standar akuntansi sektor publik dalam melakukan pencatatan ataupun pelaporan keuangan mengenai tuntutan yang diberikan. Selain itu menaruh perhatian lebih kepada perubahan budaya organisasi juga dapat memperbaiki budaya organisasi demi tercapainya *Good Governance* dengan mempermudah pelaku organisasi

sektor publik ketika menentukan keputusan yang efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya dan mengembangkan pelayanan bagi masyarakat. Arti kata *good* memiliki makna mutu-mutu yang menjunjung tinggi kemauan/tekad rakyat yang sesuai dengan pelaksanaan manajemen pembangunan serta bertanggung jawab dan satu tujuan dengan prinsip demokrasi yang efisien. Penerapan *good governance* dapat mencegah ataupun meminimalisir terjadinya kecurangan dan kesalahan yang akan dilakukan oleh aparatur pemerintah seperti penyalahgunaan kekuasaan hingga korupsi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raheni dan Putri (2019) tentang Pengaruh *Good Governance* dan Budaya Organisasi pada Kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan desa di kota Denpasar menunjukkan bahwa kinerja aparatur dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penerapan *good governance* dan budaya organisasi. Apabila penerapan *good governance* semakin baik maka hasil yang diperoleh semakin baik pula begitupun sebaliknya jika *good governance* mengalami kemerosotan maka akan berdampak pada kinerja aparatur pemerintah.

Konsep *good governance* termasuk salah satu tuntutan yang hendaknya dipenuhi oleh sektor publik terutama pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara otonomi daerah harus mampu menerapkan prinsip *good governance*. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah daerah diharuskan untuk lebih tanggap dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep *good governance* diartikan sebagai konsep yang melaksanakan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya pemerintahan yang *good governance* dapat menciptakan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan

menekankan pada proses pengelolaan keuangan pemerintah. Lahirnya *good governance* di Indonesia berawal dari penyelewengan yang dilakukan ataupun melaksanakan hal-hal yang tidak dilegalkan oleh Undang-Undang yang berlaku seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Demi terciptanya pemerintahan yang baik di Indonesia bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka ditetapkan Undang-Undang yang mengatur tentang hal ini dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal yang menjadikan pertimbangan pembahasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan arti serta prinsip dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri.

Untuk mencapai pemerintah yang *good governance* salah satu upaya lain yang harus dilaksanakan dalam pemerintahan ialah menerapkan sistem pelaporan keuangan negara. Semakin transparan pelaporannya maka akan semakin baik pula pemerintahan tersebut. Organisasi pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan mencari keuntungan bukan laba. Organisasi dengan tujuan ini disebut sebagai Akuntansi Sektor Publik. Dengan demikian Akuntansi Sektor Publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) yang dikeluarkan oleh lembaga sektor publik seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ataupun lembaga sektor publik lain sebagai tambahan informasi dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

Standar akuntansi merupakan panduan dalam menyajikan laporan keuangan diperuntukkan bagi pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas

tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar penulisan laporan keuangan dalam akuntansi digunakan oleh penyusun laporan keuangan sebagai acuan untuk memberikan informasi yang akan diberikan kepada pihak di luar organisasi. Standar tersebut penting agar laporan keuangan lebih bermanfaat (bagi pihak yang membutuhkan), penyampaianannya jelas sehingga memudahkan pihak yang membutuhkan, dapat dibandingkan serta tidak menyesatkan. Akuntabilitas merupakan pondasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan kejujuran. Pada tahun 2011, Indonesia baru menerapkan sistem ini dimana sektor swasta menggunakan standar Akuntansi Internasional (IFRS) untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan Standar Akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, untuk sektor pemerintahan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Walaupun dianggap belum akrual secara utuh, akan tetapi perlu diketahui bahwa standar akuntansi pemerintah memiliki peran utama dalam lembaga sektor publik karena dapat memberikan jawaban atas tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi publik.

Akuntansi sektor publik adalah komponen akuntansi yang digunakan oleh organisasi pencari keuntungan nonlaba sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga publik dituntut oleh masyarakat supaya bertanggungjawab serta mengelolanya dengan transparan. Akuntansi sektor publik berbeda dengan sektor swasta berdasarkan pengaruh dari lingkungan disekitarnya.

Organisasi yang bergerak di sektor publik memiliki cakupan lingkungan yang lebih kompleks dibandingkan sektor swasta.

Ciri istimewa yang dimiliki lembaga publik yang utama ialah tujuan, sifat dan sumber dana. Organisasi sektor publik memiliki sifat organisasi nonlaba (nonprofit) dengan tujuan hanya membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan administratif yang dibutuhkan serta memupuk kesejahteraan. Organisasi sektor publik sering diartikan sebagai organisasi yang berorientasi pada kepentingan warga negara atau rakyat. Berdasarkan orientasi pada rakyat maka organisasi publik umumnya tidak berorientasi mencari laba sebagai tujuan akhirnya. Inilah karakteristik utama yang ada dalam organisasi sektor publik yang identik dengan organisasi negara atau pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi publik merupakan organisasi yang sengaja dibentuk untuk mewujudkan pelayanan kepada publik atau rakyat dengan tujuan utama dan sumber pendanaan berasal dari pajak. Kepuasan publik merupakan komitmen utama pada organisasi sektor publik

Fenomena yang terjadi di Indonesia menjadi pemicu utama dalam keberhasilan pada penerapan *Good Governance* ialah minimnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap budaya organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Sofian Efendi *dalam* Sari (2017:26) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab belum tercapainya pertumbuhan administrasi adalah tidak ada perhatian yang diberikan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan amanah terhadap perkembangan budaya organisasi. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan suatu keharusan

dalam pengaplikasian tata pemerintahan yang baik dan amanah. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam menjalankan pengembangan serta penerapan akuntansi sektor publik menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mencapai prinsip transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik yang mencapai *good governance* (*accounting for government*).

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Good Corporate Governance* sudah ditetapkan sejak zaman dahulu, namun belum diterapkan secara maksimal pada pemerintahan desa. Sehingga upaya memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk dilakukan dan bukan menjadi hal yang asing lagi, terdapat beberapa kegiatan telah terlaksana seperti Program Pelayanan Prima yang diprakarsai oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara. Sehingga disimpulkan bahwa kondisi tata pemerintahan yang baik bukan tuntutan dari luar namun menjadi cita-cita masyarakat banyak.

Penelitian mengenai *good governance* telah banyak dilakukan seperti Widasari dan Putri (2018) tentang Pengaruh *good governance* dan budaya organisasi terhadap kinerja manajerial penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Badung, Raheni dan Putri (2018) Pengaruh *good governance* dan budaya organisasi pada kinerja aparatur pemerintah penyelenggara pemerintahan desa di Kota Denpasar, Florensia Manengal (2019) Konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Eka Nurmala Sari (2014) Pengaruh budaya

organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik serta dampaknya terhadap *good governance*, dan Sjahrudin Rasul (2000) Penerapan *good governance* di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Priyatno, Diana dan Afifudin (2017) Pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik serta dampaknya terhadap *good governance* (studi kasus pada SKPD di Kota Malang). Penelitian yang dilakukan oleh Susanto, Yusuf dan Rachmawati (2019) menunjukkan bahwa dalam lembaga pemerintah di Indonesia pada pemerintah daerah provinsi telah terdapat upaya-upaya untuk menerapkan *good governance* dan diambil kesimpulan bahwa faktor *good governance* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dari penelitian ini pula dapat disimpulkan apabila pemerintah menerapkan *good governance* dengan kualitas yang tinggi akan dapat menjamin tercapainya kinerja suatu pemerintah daerah. Susanto, Yusuf, dan Rachmawati ini menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas penelitian mengenai penerapan *good governance* di pemerintah daerah/kabupaten di Indonesia.

Penelitian ini dipicu oleh keinginan dan dorongan dari Bupati Nganjuk untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Dikutip dari laman bpkp (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama tiga tahun berturut-turut, Drs. H. Taufiqurrahman selaku Kabupaten Nganjuk pada saat itu, memiliki tekad untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta tata kelola keuangan yang transparan dan

akuntabel. Karena perencanaan yang baik merupakan hal yang sangat penting dimana perencanaan yang baik dan didukung dengan pelaksanaannya serta pelaporannya yang baik maka akan memberikan hasil yang baik juga.

Badan Organisasi Sekretaris Daerah (Setda) mengadakan bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan akuntabilitas dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nur Solekan menerangkan bahwa predikat nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Nganjuk berada di predikat B dengan nilai 67,45 pada tahun 2023 yang mana predikat tersebut masih jauh dari nilai implementasi SAKIP di kabupaten/kota lain di Jawa Timur dengan nilai rata-rata 74,03. Untuk itu pihaknya berharap Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 dan seterusnya dapat meningkatkan dan mengejar nilai SAKIP kabupaten/kota lainnya.

Dikatakan akuntabel apabila dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara baik dengan patokan dokumen-dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra, Renja RKA dokumen perencanaan lainnya dan Realisasi Anggaran. Sehingga yang dilaporkan dan paling berkaitan dengan perencanaan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi mengenai pengaruh budaya organisasi serta pentingnya menerapkan Sistem Akuntansi Sektor Publik dalam pemerintah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik serta dampaknya terhadap *Good Governance*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap penerapan akuntansi sektor publik?
2. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap *good governance*?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap *good governance* melalui penerapan akuntansi sektor publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka diharapkan tujuan-tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi penerapan akuntansi sektor publik
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap *good governance*
3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap *good governance* melalui penerapan akuntansi sektor publik

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dari penelitian yang dilakukan dalam mengembangkan teori yang terkait untuk menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan panduan akuntansi sektor publik serta menjadikan pemerintahan sebagai organisasi yang baik serta dapat memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman pemerintahan dalam bertugas maupun ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan teori pada akuntansi sektor publik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan berpedoman dan merujuk dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai dasar pedoman penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

N o.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo, 2016, Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa	1. Pelaksanaan pengaturan dana desa 2. Faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan sektor publik	Metode penelitian dengan studi kasus.	Kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh kepala desa serta aparat pemerintah desa dan minimnya kesiapan untuk melaksanakan UU 6/2014. Minimnya pemahaman serta kesiapan dikarenakan kurangnya sosialisasi dan bimbingan oleh pemerintah.
2.	Yusniyar, Darwanis, dan Abdullah, 2016, Pengaruh	Sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian intern, good governance,	Penelitian kuantitatif dengan metode	Sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern berpengaruh

	penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern terhadap good governance dan dampaknya pada kualitas laporan keuangan	dan kualitas laporan keuangan	sensus dan data panel tidak seimbang dan analisis menggunakan regresi linear berganda	terhadap good governance. Sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan lemah terhadap kualitas laporan keuangan.
3.	Priyatno dan Zanuvar, 2017, Pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik dan dampaknya terhadap <i>good governance</i> .	Budaya organisasi, <i>good governance</i> , efektivitas, akuntansi sektor publik	Metode sensus dengan metode analisis path	Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap <i>good governance</i> . Karena budaya organisasi mempengaruhi efektivitas penerapan akuntansi sektor publik sebagai pedoman terciptanya pemerintahan yang <i>good governance</i>
4.	Mailoor, Sondakh dan Gamaliel, 2017, Pengaruh sistem akuntansi pemerintahan, budaya organisasi, kinerja aparatur pemerintah daerah, peran APIP, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penerapan good governance	Sistem akuntansi pemerintahan, kinerja aparatur pemerintah, peran aparat pengawasan intern pemerintah, dan sistem pengendalian intern pemerintah	Purposive sampling dengan memperoleh data melalui penyebaran kuesioner	Sistem akuntansi pemerintahan, kinerja aparatur pemerintah daerah, peran APIP, dan sistem pengendalian intern pemerintah semuanya memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penerapan good governance. Sedangkan budaya organisasi tidak memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap penerapan <i>good</i>

				<i>governance.</i>
5.	Sunarmo, Widianingsih, dan Hidayat, 2018, Penerapan Prinsip-prinsip good government governance, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi SDM terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah	Prinsip-prinsip good government governance, sistem pengendalian intern pemerintah, kinerja aparatur pemerintah	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Penerapan prinsip good government governance tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah serta kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah.
6.	Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap kinerja organisasi sektor publik dengan akuntabilitas sebagai variabel moderasi pada badan pertanahan nasional Kabupaten Malang	Kejelasan anggaran, pengendalian akuntansi, kinerja organisasi sektor publik, akuntabilitas	Metode kuantitatif dengan uji regresi linier berganda	Kejelasan sasaran anggaran digunakan untuk meningkatkan kinerja para pegawai dan pengendalian akuntansi diperukan untuk mengambil tindakan jika kinerja yang dilakukan berbeda dengan apa yang telah direncanakan.
7.	Ni Putu Rika Raheni, Asri Dwija Putri, 2019, Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Budaya Organisasi pada Kinerja aparatur penyelenggara	1. Budaya organisasi 2. <i>Good governance</i> 3. Kinerja aparatur negara pemerintahan desa	Metode kuantitatif dengan data utama kuesioner menggunakan analisis regresi linier berganda	Kinerja aparatur pemerintah desa dipengaruhi oleh <i>good governance</i> . Semakin baik penerapan <i>good governance</i> maka kinerja aparatur pemerintah desa akan semakin baik.

	pemerintahan desa di kota Denpasar			Apabila terjadi kemerosotan pada <i>good governance</i> maka hasilnya akan berdampak pada kinerja pemerintahan.
8.	Florensia Menangel, 2019, Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999	1. Konsep penyelenggaraan <i>good governance</i> yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 2. Sistem pemerintahan yang baik di Indonesia	Yuridis normatif	UNDP mengungkapkan konsep <i>good governance</i> berupa penggunaan wewenang ekonomi, politik serta administrasi untuk mengelola urusan negara pada semua lapisan. Tindakan administrasi negara erat kaitannya dengan <i>good governance</i> secara terbuka dan saling mempengaruhi.
9.	Muhammad Ridwan, Mus'id, 2019, Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik	1. Komponen-komponen yang mempengaruhi kinerja organisasi	Pendekatan kuantitatif	Secara signifikan kinerja organisasi diantaranya dipengaruhi oleh adanya tujuan yang jelas dan terarah, adanya dorongan kerja, sistem penilaian kinerja, desentralisasi, dan partisipasi anggaran.
10	Prabawa, Karamoy, dan Mawikere, 2020, Pengaruh sistem pengendalian intern dan	Penerapan sistem pengendalian internal, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan sedangkan akuntabilitas pengelolaan

	akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap good governance (Studi empiris di Kabupaten Minahasa)			keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap upaya mewujudkan <i>good governance</i> .
--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa *good governance* dalam pemerintahan akan tercapai apabila aparatur pemerintah melaksanakannya dengan baik serta sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam pelaksanaannya aparatur pemerintah dibantu oleh keseluruhan pejabat Negara yang bekerja pada setiap instansi pemerintah tidak terkecuali pemerintah desa. Pemerintah desa menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibantu oleh perangkat desa sebagai elemen dalam menyelenggarakan pemerintahan desa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Kepala desa bersama perangkat desa bertanggungjawab atas pelaksanaan sistem pemerintahan desa yang baik sehingga terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memberikan informasi yang bersiat profesional, transparan, efektif dan efisien serta pelaporan keuangan yang akuntabel. Upaya yang dapat dilakukan kepala desa dan perangkat desa demi tercapainya tata pemerintahan yang baik ialah dengan menerapkan *good governance*. Dengan menggunakan prinsip tersebut, kepala desa serta beserta perangkatnya akan lebih mudah dalam menentukan keputusan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat

serta dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan jabatan sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan (*research gap*) adalah banyaknya tuntutan dari masyarakat karena pertanggungjawaban pemerintahan yang kurang sesuai dengan standar pelaporan organisasi sektor publik terutama dalam hal transparansi dana serta belum ada yang melakukan penelitian mengenai hal ini di lokasi yang akan dilakukan penelitian. Adapun Indonesia sebagai penduduk mayoritas menganut agama Islam, maka tidak menutup kemungkinan apabila dalam sistem pemerintahan terdapat perpaduan prinsip dengan prinsip islam dan konvensional.

Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya terutama pada penelitian yang dilakukan oleh Raheni dan Putri (2017) terletak pada variabel penelitian dan teknik analisis data. Raheni dan Putri (2017) melakukan penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel *good governance*, budaya organisasi dan kinerja negara aparatur pemerintahan desa. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (*path*) variabel yang digunakan adalah budaya organisasi, *good governance*, dan penerapan akuntansi sektor publik sebagai variabel intervening.

Sedangkan persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Raheni dan Putri (2017) terhadap penelitian ini adalah sama sama membahas tentang topik *good governance* dan budaya organisasi dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. *Good governance* dan budaya organisasi yang dibahas oleh kedua peneliti ini

merupakan faktor yang memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah apabila keduanya dilakukan dengan baik maka akan mencapai pemerintahan yang baik.

Perbedaan lain yang menjadi dasar penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2015) yang mengatakan bahwa *good governance* tidak mempengaruhi kinerja manajerial pemerintah daerah. Terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maliol, Sondakh dan Gamaliel (2017) bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Dasar pemikiran teori legitimasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah keberadaan suatu organisasi publik akan terus berlanjut apabila dalam pemerintahan organisasi beroperasi sesuai dengan sistem nilai dalam masyarakat. Teori ini didasari dengan perjanjian sosial antara perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan dapat beroperasi dengan memanfaatkan sumber ekonomi. Adanya perjanjian sosial dikarenakan timbulnya gejala yang terjadi di lingkungan perusahaan dalam kehidupan sosial masyarakat agar tercipta kesetaraan dan keseimbangan sehingga memunculkan persetujuan yang saling melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Secara spesifik teori legitimasi berfokus pada hubungan yang terjadi antara pemerintah atau organisasi dengan masyarakat. Sehingga hal

ini menjadi jembatan untuk strategi organisasi khususnya yang berkaitan dengan pengakuan diri di tengah masyarakat. Teori ini mengungkapkan bahwa suatu organisasi secara berkesinambungan harus menjamin telah melaksanakan tugasnya secara normal sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.

Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan sistem tata kelola suatu perusahaan atau instansi berlandaskan perspektif islam. Saat ini yang sering dijumpai ialah *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan aspek tata kelola suatu perusahaan atau instansi yang berlandaskan perspektif konvensional. Perbedaan antara *Islamic Corporate Governance* (ICG) dengan *Good Corporate Governance* (GCG) terletak pada landasan yang digunakan. Sesuai dengan namanya, *Islamic Corporate Governance* (ICG) menggunakan prinsip berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan *Good Corporate Governance* (GCG) menggunakan prinsip yang telah ditetapkan di Indonesia atau sesuai dengan Standar Akuntansi Sektor Publik.

Pada dasarnya prinsip *Good Corporate Governance* telah terkandung dalam prinsip-prinsip Islam. Prinsip dalam *Corporate Governance* konvensional diantaranya responsibility, transparansi, akuntabilitas, dan *fairness*. Responsibility menunjukkan sifat amanah (dapat dipercaya), tabligh dan fathonah, transparansi merujuk pada shiddiq yang artinya benar, akuntabilitas menunjukkan sifat shiddiq dan amanah, *fairness* merujuk pada shiddiq dan amanah. Konsep pemerintahan dalam islam

dengan konsep konvensional memiliki prinsip yang sama akan tetapi keduanya tidak bisa dianggap serupa. Karena pedoman hukum yang digunakan berbeda sehingga berbeda pula cara mewujudkan dan pengaplikasiannya. Dari perbandingan tersebut prinsip-prinsip yang diterapkan dalam *Corporate Governance* Islam lebih bulat daripada prinsip dalam *Corporate Governance* konvensional.

Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel yang sering digunakan ialah budaya organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap *good governance* ataupun memiliki pengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah.

2.2.2 Budaya Organisasi

Budaya merupakan nilai-nilai yang melekat dalam diri manusia yang dapat mempengaruhi sikap serta perilaku sehari-harinya. Karena setiap manusia bertindak dalam lingkup kebudayaan.

Organisasi adalah bentuk perserikatan yang setidaknya terdiri dari dua orang atau lebih untuk bekerja sama demi mewujudkan tujuan yang sama, terikat secara formal dalam persekutuan. Dalam organisasi setiap orang melakukan pekerjaan secara bersama-sama secara lebih efektif dan efisien melalui tindakan yang telah dibagi berdasarkan tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan pula sebagai kerangka kerja yang memandu perilaku sehari-hari dan membuat keputusan bagi karyawan dan mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi (persada dan amanshur 2022)

Menurut Yamin (2014) budaya organisasi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam hierarki organisasi yang mewakili norma-norma perilaku dan diikuti oleh para anggota dalam organisasi. Sudaryono (2017) budaya organisasi merupakan tata nilai yang disepakati dan ditaati oleh seluruh anggota organisasi yang bersifat dinamis dan mampu untuk meningkatkan kinerja organisasi. Budaya organisasi dapat membangun langkah manajer dalam pengambilan keputusan termasuk pengawasan sistem. Sistem kontrol dan struktur kekuasaan dalam perusahaan dapat mencerminkan pemikiran yang mendasar atas paradigma dari perusahaan. Dengan paradigma tersebut dapat mempengaruhi perilaku pekerja dalam menerapkan praktek akuntansi termasuk didalamnya pembentukan laporan, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga menghasilkan budaya organisasi yang baik dan tercipta pemerintahan sesuai dengan *good corporate governance*.

Usono dan Adigawe (2014) menyatakan bahwa budaya organisasi menggambarkan keadaan organisasi yang sesungguhnya dari sebuah organisasi, budaya yang produktif adalah budaya yang dapat menjadikan organisasi menjadi kuat dan tujuan organisasi dapat tercapai. Raheni dan Putri (2019:1319) budaya organisasi berpengaruh positif pada kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan desa di Kota Denpasar. Rahardjo (2016) dan Kusumah (2015) menemukan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja. Arumsari (2016) menemukan bahwa semakin kuat budaya organisasi pada KAP maka

kinerja auditor yang dihasilkan semakin baik. Budaya organisasi yang baik menjadi penentu dari tata kelola perusahaan yang baik, berbentuk dan berkembangnya manajemen, kuatnya tanggungjawab sosial dari instansi terhadap lingkungan dan semangat untuk menjaga keunggulan instansi.

Konsep *Good Governance* merupakan konsep dimana pemerintah yang baik dapat menjunjung nilai-nilai dan kehendak rakyat agar mencapai pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memiliki prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan responsif.

2.2.3 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (American Accounting Association, 1966 *dalam* Halim & Kusufi, (2016:3). Sedangkan akuntansi sektor publik merupakan organisasi yang bertujuan mencari keuntungan nonlaba. Kebijakan yang termasuk dalam akuntansi sektor publik meliputi proses manajerial dan pertanggungjawaban. Seperti perencanaan, penganggaran, dan legalisasi anggaran yang menaungi penetapan pos-pos kegiatan beserta anggaran dananya diatur dalam akuntansi sektor publik, sehingga sering mendapat julukan sebagai akuntansi dana yang berfokus dalam kegiatan mencari dana dari publik dan mengalokasikan dana untuk publik.

Laporan keuangan pemerintah pada dasarnya berbeda dengan laporan keuangan pada sektor swasta. Perbedaan ini meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Namun disisi lain juga terdapat beberapa persamaan antara keduanya yakni membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan.

Tabel 2.2 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Laporan Keuangan Sektor Pemerintah	Laporan Keuangan Sektor Swasta
• Fokus finansial dan politik • Kinerja diukur secara finansial dan non-finansial • Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas • Berfokus pada bagian organisasi • Melihat ke masa depan secara detail • Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan • Laporan diperiksa oleh Treasury Cash Accounting	• Fokus finansial • Sebagian besar diukur secara finansial • Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur • Berfokus pada organisasi secara keseluruhan • Tidak dapat melihat masa depan secara detail • Aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktis akuntansi • Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama dalam penyusunan laporan keuangan sebagai salah satu wujud pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan memiliki makna sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan sebagai alat penghubung informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan serta untuk menilai kinerja

sebuah organisasi. Kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam sektor publik tidak hanya mengacu pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi keuangan, namun juga menyediakan informasi non-moneter seperti output pelayanan yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan.

Pemerintah desa sebagai pelaku instansi sektor publik yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan memiliki ciri tersendiri dengan organisasi sektor swasta. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi sektor publik:

1. Faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi organisasi sektor publik sebagai berikut:
 - a. Perkembangan ekonomi
 - b. Tingkat inflasi
 - c. Pertumbuhan pendapatan perkapita (GNP/GDP)
 - d. Tenaga kerja
 - e. Pinjaman dan pertolongan luar negeri
 - f. Berkembangnya teknologi
2. Faktor politik termasuk salah satu faktor yang juga menguasai organisasi sektor publik adalah sebagai berikut:
 - a. Jenis pemerintahan yang lebih berkuasa
 - b. Ideologi negara
 - c. Hubungan yang terjalin antara negara dan masyarakat
 - d. Hubungan internasional

e. Kelembagaan

3. Faktor kultural

- a. Keberagaman suku, bahasa, ras budaya dan agama
- b. Sistem nilai di masyarakat
- c. Sosiologi masyarakat
- d. Tingkat pendidikan

4. Faktor demografi

- a. Pertumbuhan penduduk
- b. Struktur usia penduduk
- c. Migrasi
- d. Tingkat kesehatan

Akuntansi sektor publik menurut islam merupakan wujud dalam bentuk akuntabilitas publik yang terdiri dari akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan. Akuntabilitas dan transparansi merupakan satu kesatuan yang sangat berkaitan, karena apabila tidak ada transparansi dalam suatu entitas maka tidak akan mungkin terdapat akuntabilitas (Juniaswati)

Dalam perspektif syariah islam pengelolaan keuangan publik harus dilakukan dengan azas transparansi, jujur dan berkeadilan demi untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Konteks pengelolaan keuangan publik, meliputi tiga konsep penting yaitu: kebijakan yang baik dari pihak pengelola, kerjasama

yang solid, dan program kerja yang dinamis dan kontekstual. Diantara mekanisme Qur'ani agar tercipta kebijakan yang baik dari pihak pengelola adalah publik harus mengoptimalkan tiga peran utama, yaitu mengajak pada kebaikan dan melarang kemungkaran.

2.2.4 Good Governance

Arti *good governance* sering dikatakan sebagai pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif untuk tujuan organisasi dengan menjaga sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai “Kepemerintahan adalah pengimplementasian kewenangan pada bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengandalikan berbagai urusan negara pada semua tingkatan termasuk menjalankan kebijakan negara untuk mendukung terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas sosial dan masyarakat”. UNDP menyampaikan sembilan prinsip sebagai karakteristik *good governance* yaitu: partisipasi, *rule of law*, transparansi, *responsiveness*, *consensus orientation*, *equity*, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, *strategic vision*.

Good governance menurut masyarakat memiliki makna dan pandangan yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Namun pada intinya, *good governance* memiliki karakteristik yang melekat dalam prakteknya. Pada prakteknya, *good governance* harus dapat memberikan ruang kepada pelaku lembaga non-pemerintah untuk berperan serta dalam kegiatan pemerintahan sehingga menimbulkan sinergi antara lembaga

pemerintah dengan non-pemerintah, dalam sisi lain *good governance* memiliki nilai-nilai yang menjadikan pemerintah untuk bekerja secara efektif demi mewujudkan kesejahteraan bersama yang memuat nilai-nilai efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi poin utama. Good governance dalam perspektif lain juga diartikan sebagai praktek pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam praktek lain, *good governance* adalah praktek penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan umum. Praktek penyelenggaraan negara dinilai baik apabila mampu mewujudkan transparansi, budaya hukum, dan akuntabilitas publik (Hoesada, 2016:121). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syafrion (2015), dan Ristianti (2014) menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengelolaan keuangan daerah. Prayitno, Diana dan Afifudin (2017) pada penelitiannya bahwa *good governance* juga dipengaruhi oleh efektivitas penerapan akuntansi sektor publik.

Dalam pandangan hukum islam, *good governance* merupakan gerakan *ijtihadi*. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik menggunakan konsep *maslahat mursalah* yang sesuai dengan tempat dan keadaan demi mewujudkan kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga menciptakan pemerintahan yang baik karena kebijakan-kebijakan

yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

Dalam perspektif islam, *good governance* dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencapai masalah yang menjadi tujuan syari'at. Masalah tersebut adaah terciptanya suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi serta pencegahan korupsi baik secara poitik maupun administratif. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah yang sesuai dengan konsep *good governance* merupakan pemerintah yang taat dengan hukum dan undang-undang seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an berikut:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“Orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan” (QS. Al-Hajj, 22:41)

Dalam konsep *good governance* pemerintah yang baik adalah terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana dalam islam dijelaskan pula bahwa seorang penguasa, hakim ataupun aparat pemerintah lainnya tidak diperbolehkan menerima suap dengan maksud untuk memperoleh keputusan mengenai suatu kepentingan yang

seharusnya diputuskan tanpa pembayaran daam bentuk apapun. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 188:

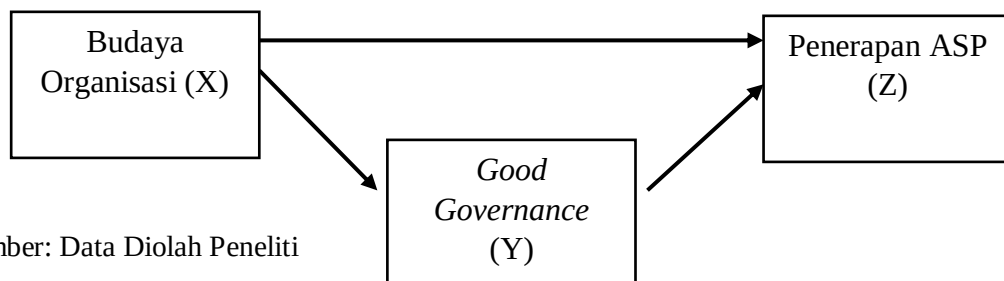
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah, 2:188)

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian dan teori-teori yang telah dijabarkan, maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual



Sumber: Data Diolah Peneliti

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Sugiyono adalah asumsi sementara terhadap rumusan masalah penelitian (2018:63). Secara literal hipotesis diterjemahkan dengan suatu pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara atau bersifat belum final sehingga masih membutuhkan tindakan untuk dibuktikan kebenarannya melalui pemeriksaan ilmiah. Penting untuk diketahui bahwa apa yang diutarakan dalam hipotesis adalah dugaan sementara yang diyakini besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban benar.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Stephen B. Salter dan Frederick Niswander (1995) *dalam* Sari (2017:29) menyatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi seseorang secara aktual dalam pembuatan pelaporan keuangan. Secara keseluruhan dari hasil keputusan pengungkapan lainnya diperlukan tindakan pemeriksaan dalam penetapan dampak riil dari kultur dan pelaporan keuangan disusun sesuai Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Budaya dan lingkungan merupakan faktor yang saling melekat sehingga membentuk konteks dimana akuntansi berjalan dan budaya organisasi akan diakui karena budaya organisasi termasuk komponen penting dari literatur akuntansi internasional. Penelitian yang dilakukan oleh (Priyatno & Zanuvar, 2017) menunjukkan bahwa secara signifikan praktek akuntansi sektor publik mendapat pengaruh dari budaya organisasi. Perilaku organisasi menegaskan bahwa perilaku manusia yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi adalah awal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi mendasarkan diri pada ilmu perilaku yang dikembangkan dengan pusat perhatian oleh dua komponen yakni individu-individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah perilaku.

Berdasarkan penjabaran dan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁: Budaya organisasi berpengaruh terhadap penerapan akuntansi sektor publik

2.4.2 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap *Good Governance*

Good governance apabila diartikan dalam bahasa sehari-hari adalah tata pemerintahan yang baik. Maksudnya ialah masyarakat menuntut aparatur pemerintah dalam menjalankan perintah negara sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah sebagai pelaku organisasi sektor publik merupakan perwakilan rakyat yang bekerja untuk rakyat serta bertanggungjawab kepada rakyat dan negara. Aparatur pemerintah bertanggungjawab mengenai keuangan serta pengaturan pengelolaan yang mana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengatakan bahwa pengembangan dan pengaplikasian sektor publik sangat urgent untuk dilakukan sebagai senjata untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik demi terciptanya *good governance*. . Karakteristik organisasi publik:

1. Mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
2. Tidak bertujuan mencari keuntungan materi

3. Pembiayaan organisasi bersumber dari pemungutan atau pembayaran pajak oleh rakyat atau retribusi
4. Organisasi publik negara dapat memaksa warga negara untuk membayar pajak, didenda/dihukum saksi
5. Peraturan pemerintah berlaku untuk seluruh warga negara dan menghukum atau memberikan sanksi bagi yang melanggar

Berdasarkan penjabaran dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂: Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap *good governance*

2.4.3 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap *Good Governance* melalui Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan bentuk akuntabilitas, transparansi, dan prediktabilitas kinerja organisasi. Menjadi kewajiban utama dalam melaksanakan pelaporan pemerintahan sesuai akuntansi sektor publik bagi lembaga publik yang menginginkan transparansi, keterbukaan, berlaku adil, tidak memihak kepada golongan tertentu Christeen dkk., (2007) dalam Halim & Kusufi (2016:15). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar membentuk budaya organisasi yang baik sehingga menciptakan pemerintahan yang *good governance*.

Sehingga dapat diambil kesimpulan untuk hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₃: Budaya organisasi berpengaruh terhadap *good governance* melalui penerapan akuntansi sektor publik secara tidak langsung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang dipakai untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kuantitatif/statistik, untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:8). Pengertian lain dari pendekatan kuantitatif adalah mengumpulkan data berwujud data kuantitatif atau data lain yang sejenis yang dapat dikuantitatifkan serta dapat diolah menggunakan teknik statistik. Pendekatan kuantitatif memandang tingkah laku manusia dapat diramal dan realitas sosial, objektif dan dapat diukur.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan responden Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas di Kabupaten Nganjuk. Kuesioner akan dibagikan kepada responden di tingkat kecamatan atau kedudukan lain yang setingkat.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono adalah kawasan generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan ciri-ciri khusus yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulannya (2017:80). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan yang akan menjadi populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Nganjuk dengan responden utama Kepala Pemerintahan tingkat Kecamatan atau satuan lain yang setingkat dengan seluruh populasi sebanyak 80 responden yang terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Bendahara..

Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi merupakan pengertian Sampel menurut Sugiyono (2017:81) dengan begitu peneliti akan lebih mudah untuk menentukan sampelnya.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana penelitian ini dilakukan kepada perangkat daerah yang memenuhi target dengan kriteria-kriteria tertentu, seperti:

- a) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk
- b) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ruang lingkupnya adalah Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk
- c) Responden merupakan anggota SKPD yang menjabat sebagai Camat, Sekretaris Camat, Kasubag Umum dan Kasubag Program Evaluasi dan Keuangan.

3.5 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode survei adalah satu bentuk teknik penelitian dimana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang, melalui pertanyaan-pertanyaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber yang digunakan merupakan data

primer. Data primer didapat dari responden secara langsung dengan teknik kuesioner, wawancara dan observasi.

Analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan terhadap fenomena yang terjadi dengan mengumpulkan dan menyusun data kemudian menafsirkan secara deskriptif. Analisis deskriptif dapat bersifat gambaran refleksi atau membandingkan persamaan dan perbedaan kasus/perbedaan tertentu.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan dan penganalisisan data ialah peringkat penting untuk menjamin kejayaan atau kegagalan sesuatu kajian Jainabee (2005) *dalam* Samsu (2017:136). Dalam penelitian kuantitatif metode pengumpulan data dilakukan melalui angket (*questionnaire*) atau tes (*test*). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penyusunan laporan dengan sumber kepustakaan. Peneliti mencari informasi terkait dengan topik yang akan diteliti dengan mengumpulkan data-data seperti buku-buku, catatan-catatan serta literatur lain sesuai topik yang akan dibahas.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan keadaan di lapangan, maka peneliti perlu menggunakan teknik ini untuk menunjang penelitian yang

akan dilakukan. Cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan sebagai berikut:

c. Wawancara (*Interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar topik penelitian kepada responden atau pihak langsung yang bersangkutan.

d. Pengamatan Langsung (*Observation*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung dilakukan untuk memperoleh data melalui peninjauan langsung di lapangan serta meyakinkan bahwa data yang telah diperoleh benar adanya.

e. Kuesioner (*Questionnaire*)

Yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari responden yang berbentuk kuesioner.

3.7 Operasional Variabel

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi variabel X (Budaya organisasi), variabel Y (*Good governance*), dan variabel Z (Penerapan akuntansi sektor publik). Variabel-variabel ini akan dioperasionalisasi berdasarkan dimensi, indikator, ukuran dan skala penelitian. Operasional variabel digunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk menyusun instrumen kuesioner. Menurut Sekaran (2017:70) “Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama atau

pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda”. Maka dapat disimpulkan variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas/Independen (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya perubahan atau munculnya variabel dependen (terikat) adalah definisi variabel bebas menurut Sugiyono (2017:39).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Budaya Organisasi (X). Menurut Sudaryono (2017) bahwa budaya organisasi merupakan tata nilai yang telah disepakati dan ditaati oleh seluruh anggota organisasi yang bersifat dinamis dan mampu untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah profesionalisme, keteraturan, permusuhan/konflik dan integritas .

Budaya organisasi adalah nilai-nilai dan keyakinan yang timbul akibat penerapannya dan telah dikembangkan bersama sebagai acuan perilaku pegawai dalam organisasi. Indikator dari budaya organisasi meliputi inovasi, perhatian pada hal-hal rinci, orientasi pada individu, orientasi pada hasil serta orientasi bersama (Robbins dan Judge, 2016). Menurut Mardiasmo setidaknya terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yakni penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, serta efektivitas dan efisiensi.

b. Variabel Terikat/Dependen (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang mendapatkan pengaruh atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:38).

Untuk variabel dependen penelitian ini merupakan *Good Governance* (Y). Konsep *governance* lebih mengacu kepada cara suatu bangsa dalam menyikapi kekuasaan dan mengelola sumberdaya serta mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Indikator yang digunakan dalam variabel *good governance* ini ialah akuntabilitas publik dan transparansi. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner yang telah digunakan dalam penelitian dan dikembangkan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

c. Variabel Mediasi/Intervening (Z)

Variabel mediasi adalah “Variabel perantara yang terletak diantara variabel independen dengan variabel dependen sehingga secara tidak langsung variabel dependen telah mempengaruhi perubahan ataupun adanya variabel dependen baru” (Sugiyono, 2017:40).

Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi Sektor Publik (Z). Mahsun et al. (2016:5) mengemukakan bahwa sektor publik seringkali dipahami sebagai sesuatu yang berurusan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dalam hukum. Mahsun juga mengatakan bahwa standar akuntansi sektor publik adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik (2016:47). Sehingga sebagai penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik dan

bertanggungjawab maka indikator yang digunakan meliputi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah integrasi informasi yang memadai, pembentukan laporan keuangan, penyebaran laporan keuangan yang efektif: dan informasi akuntansi yang dipercaya. Secara singkat operasional variabel dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel

Konsep Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	No. Item
Budaya Organisasi (X) "Tata nilai yang disepakati dan ditaati oleh seluruh anggota organisasi yang bersifat dinamis dan mampu untuk meningkatkan kinerja organisasi" Sudaryono (2017)	Profesionalisme	Kemampuan aparatur dalam menjalankan amanat yang sudah diberikan	interval	BO1
		Kemampuan aparatur dalam bekerja sesuai kode etik dan perilaku	interval	BO2
	Keteraturan	Menyelenggarakan pemerintah daerah dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara	interval	BO3
		Dapat bertanggungjawab atas amanat yang diberikan	interval	BO4

	Konflik	Upaya yang dilakukan dalam menangani setiap permasalahan	interval	BO5
		Menerima kritik dan saran secara terbuka	interval	BO6
	Integritas	Memiliki sifat pekerja keras, taat terhadap asas berjiwa kreatif dan inovatif	interval	BO7
		Keselarasan antara pikiran, perkataan serta perbuatan	interval	BO8
Good Governance (Y) "Praktek penyelenggaraan dinilai baik apabila mampu mewujudkan transparansi, budaya hukum, dan akuntabilitas publik" Hoesada (2016:121)	Akuntabilitas Publik	Bertanggungjawab atas segala aktivitas dan kegiatan serta mensosialisasikan secara terbuka	interval	GG1
		Memberikan informasi yang akurat kepada pihak yang membutuhkan	interval	GG2
		Masyarakat dapat memperoleh informasi tentang program serta kegiatan yang diadakan aparatur	interval	GG3
		Memberikan berbagai manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat	interval	GG4
	Transparansi	Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai barang, jasa, dan atau	interval	GG5

		pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah		
		Melaporkan segala bentuk kecurangan baik secara administratif	interval	GG6
		Tingkat keterbukaan dalam pertanggungjawaban	interval	GG7
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (Z) "Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dalam rangka mengambil keputusan oleh pihak yang membutuhkan" Halim&Kusufi (2016:3)	Integrasi informasi yang memadai	Memiliki sistem yang mampu menyajikan informasi secara menyeluruh	interval	PAS1
		Menyajikan informasi keuangan yang sesuai	interval	PAS2
	Pembentukan laporan keuangan	Menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah untuk pengambilan keputusan	interval	PAS3
		Menghasilkan laporan keuangan sebagai alat untuk memprediksi kejadian yang akan datang	interval	PAS4
	Penyebaran laporan keuangan yang efektif	Memberikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan	interval	PAS5

		Melakukan analisis terhadap laporan keuangan untuk dinilai kebenarannya	interval	PAS6
	Informasi akuntansi yang dipercaya	Memberika informasi tentang laporan keuangan tanpa mementingkan pihak tertentu	interval	PAS7
		Menampilkan informasi akuntansi yang dapat diuji, netral serta menyajikan data yang sebenarnya	interval	PAS8

3.8 Analisis Data

Analisi data merupakan kegiatan mengelompokkan data menurut variabel dan jenis responden, mentabulasi data menurut variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, serta melakukan perhitungan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah (Sugiyono, 2017:207). Dalam penelitian ini, semua jawaban dianalisis menggunakan statistik untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat mengenai topik yang diteliti. Adapun analisis yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

3.8.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif diperlukan dalam penyajian data, ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran penyajian data, yaitu daftar distribusi dan histogram. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau

lebi tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain” (Sugiyono, 2014:91). Merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Proses analisis pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyebar kuesioner kepada responden yang menjadi sampel seperti yang telah ditentukan
- b. Mengambil hasil jawaban kuesioner dari responden
- c. Data yang telah diisi oleh responden dari hasil kuesioner, kemudian ditabulasikan dalam bentuk data kuantitatif
- d. Jawaban dalam tiap responden ditampilkan dalam tabel distribusi

3.8.2 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif adalah metode penelitian dimana akan memunculkan informasi baru terhadap hipotesis yang diajukan untuk diketahui apakah menerima atau menolak hipotesis tersebut (Sugiyono, 2014:54).

Metode analisis verifikatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Analisis yang dilakukan adalah konstruk yang akan diuji apakah teruji secara empiris atau tidak serta untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung atas variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.8.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas digunakan dalam penelitian untuk menguji instrumen penelitian. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap instrumen yang digunakan apakah layak atau tidak untuk dipakai dalam penelitian.

Uji validitas merupakan persamaan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang diperoleh langsung yang terjadi pada subyek penelitian (Sugiyono, 2018:267). Pengujian ini dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Syarat minimum untuk mengungkapkan bahwa suatu butir instrumen tersebut valid adalah nilai indeks validitasnya <0.3 dan apabila koefisien korelasi Pearson Product Moment $\leq r$ tabel atau $0,3$ harus diperbaiki karena dianggap tidak valid.

Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan apakah instrumen yang dipakai reliable atau tidak. Menurut Sugiyono (2014:182) yang dimaksud reliabilitas adalah “Sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan obyek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama pula”.

3.8.4 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji hipotesis terdapat tahapan yang harus dilakukan yaitu melakukan uji asumsi klasik dengan tujuan agar dapat memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan estimasi, tidak bias dan konsisten.

a. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono dan Susanto (2015:333) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dengan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan ketentuan yang berlaku apabila nilai signifikan $>0,05$ maka residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Sugiyono dan Susanto (2015:331) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi variabel independen atau variabel bebas. Untuk mengetahui apakah terdapat multikolinieritas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF) apabila nilainya <10 dan toleransi $>0,1$ maka tidak ada masalah dalam multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

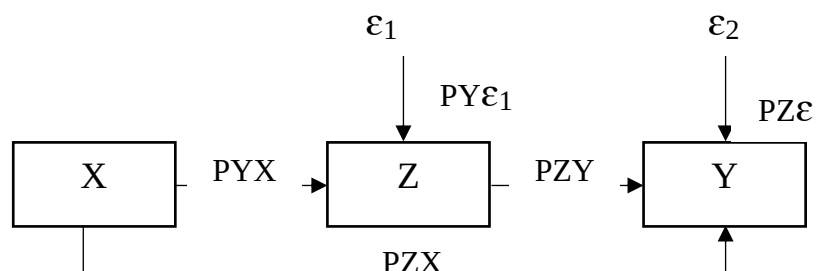
Menurut Sugiyono dan Susanto (2015:321) pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

3.8.5 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis adalah analisis jalur (*path analysis*). Metode analisis jalur digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel *eksogenus* terhadap variabel *endogenus*, karena hubungan sebab-akibat antar variabel yang hendak diuji disusun atas dasar kerangka teoritis tertentu yang mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel tersebut. Menurut (Riduwan & Kuncoro, 2014:2) model analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan maksud untuk mengetahui pengaruh langsung ataupun tidak langsung seperangkat variabel independen (*eksogen*) terhadap variabel dependen (*endogen*).

Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu *Good Governance* (Y) dan Penerapan akuntansi Sektor Publik (Z) dengan variabel independen Budaya Organisasi (X). Maka dapat dirumuskan model penelitian sebagai berikut:

Gambar 3.1 Model Penelitian



Sumber: *Data diolah penulis*

Dalam perumusan di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Sub struktur 1: } Y = P_{YX}.X + \epsilon_1$$

$$\text{Sub struktur 2 : } Z = P_{ZX}.X + \epsilon_2$$

$$\text{Sub struktur 3 : } Z = P_{ZY}.Y + \epsilon_2$$

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis dan memastikan pengaruh budaya organisasi terhadap penerapan akuntansi sektor publik serta dampaknya terhadap *good governance*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bantuan komputer berupa *software* program statistik untuk menganalisis data dengan aplikasi SPSS versi 23.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pemerintahan dibentuk untuk menjalankan sistem-sistem pemerintahan termasuk di dalamnya melayani masyarakat dalam mengembangkan kemampuan serta kreativitas demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, pemerintah tidak berfokus pada kepentingan mencari laba, akan tetapi dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan menjaga sistem ketertiban di mana masyarakat dapat menjalani hidupnya secara wajar. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari aktivitas yang terorganisasi, berdasarkan kedaulatan dan berlandaskan dasar negara untuk mencapai tujuan negara. Adanya pemerintahan yang baik dan kuat, juga tidak terhindar dari peran masyarakat yang ikut menunjang penyelenggaraan pemerintah demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kecamatan merupakan wilayah administratif di bawah naungan kabupaten yang dipimpin oleh seorang camat dengan wilayah kerja tertentu. Kecamatan membawahi beberapa desa dan atau kelurahan. Dalam menjalankan tugas sebagai camat, biasanya dibantu oleh sekretaris camat atau dikenal dengan sekcam.

Camat diangkat oleh bupati/walikota yang telah terdaftar menjadi pegawai negeri sipil serta memenuhi persyaratan menjadi camat dan menguasai

pengetahuan teknis. Selain sekcama, camat dibantu oleh perangkat kecamatan dalam menjalankan tugasnya. Perangkat kecamatan bertanggungjawab kepada camat lalu camat mempertanggungjawabkan tugasnya kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota, sehingga sebagai seorang camat tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan amanah sebagai camat.

Dari 80 bendel kuesioner yang dibagikan kepada 20 kecamatan hanya 55 bendel kuesioner yang kembali, dimana terdapat 4 Kecamatan yang tidak merespon ataupun mengembalikan kuesioner dikarenakan melewati waktu yang telah ditentukan peneliti yakni selama 2 bulan, terdapat 3 SKPD yang hanya mengembalikan 2 bendel kuesioner, 1 SKPD yang mengembalikan 1 kuesioner, sehingga kuesioner yang kembali berasal dari 16 SKPD pada tingkat Kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Sehingga jumlah kuesioner yang digunakan untuk alat analisis adalah sebanyak 12 SKPD dikalikan 4, 3 SKPD dikalikan 2, dan 1 SKPD sehingga hasilnya sama dengan 55 bendel kuesioner.

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjabarkan secara umum data-data yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat dilakukan peninjauan. Dalam pengujian data pada penelitian ini menggunakan aplikasi software SPSS versi 23. Adapun variabel dependen yang digunakan adalah *Good Governance* dan budaya organisasi sebagai variabel independen dengan variabel intervening penerapan akuntansi sektor publik. Dengan dilakukan penelitian ini, dapat diketahui hubungan yang terjadi antara budaya organisasi dengan penerapan akuntansi sektor publik, hubungan antara penerapan

akuntansi sektor publik dengan *good governance* ataupun pengaruh budaya organisasi terhadap *good governance* melalui penerapan akuntansi sektor publik.

4.1.3 Uji Validitas

Validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurnya. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa cermat suatu uji dalam melakukan fungsinya, apakah alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang perlu diukur. Hasil dari pengujian validitas dapat menentukan sah atau tidaknya setiap pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam instrumen penelitian.

Kriteria dalam uji validitas adalah dengan membandingkan nilai r hitung (*Pearson Correlation*) terhadap nilai r tabel dan hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut layak dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan analisis data menggunakan nilai r hitung (*Pearson Correlation*) dengan N of items 23 pada taraf signifikansi 0,05 dan r tabel 0,361 memperoleh hasil bahwa 23 butir soal memiliki r hitung $> r$ tabel. Dengan demikian 23 butir soal dikatakan memiliki tingkat validitas cukup.

Hasil uji validitas kuesioner X, Y dan variabel Z penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.1 Uji Validitas Budaya Organisasi (X)

Item Pertanyaan	Nilai R Tabel	Nilai R Hitung	Keterangan
X.1	0,361	0,712	VALID
X.2	0,361	0,733	VALID
X.3	0,361	0,669	VALID

X.4	0,361	0,688	VALID
X.5	0,361	0,630	VALID
X.6	0,361	0,654	VALID
X.7	0,361	0,538	VALID
X.8	0,361	0,629	VALID

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Budaya Organisasi (X) memiliki r hitung $>$ r tabel dengan nilai r tabel sebesar 0,361 yang menyatakan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel X dinyatakan valid. Nilai r tabel diperoleh dari distribusi r tabel dengan signifikansi 5%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Budaya Organisasi (X) valid dan layak dilanjutkan untuk uji reliabilitas.

Tabel 4.2 Uji Validitas *Good Governance* (Y)

Item Pertanyaan	Nilai R Tabel	Nilai R Hitung	Keterangan
Y.1	0,361	0,698	VALID
Y.2	0,361	0,720	VALID
Y.3	0,361	0,705	VALID
Y.4	0,361	0,680	VALID
Y.5	0,361	0,665	VALID
Y.6	0,361	0,690	VALID
Y.7	0,361	0,586	VALID

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel *Good Governance* (Y) memiliki r hitung $>$ r tabel dengan nilai r tabel 0,361 menyatakan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Y dinyatakan valid. Nilai r tabel diperoleh dari distribusi r tabel dengan signifikansi 5%. Berdasarkan

data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *Good Governance* (Y) valid dan layak dilanjutkan untuk uji reliabilitas.

Tabel 4.3 Uji Validitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Item Pertanyaan	Nilai R Tabel	Nilai R Hitung	Keterangan
Z.1	0,361	0,693	VALID
Z.2	0,361	0,799	VALID
Z.3	0,361	0,603	VALID
Z.4	0,361	0,686	VALID
Z.5	0,361	0,554	VALID
Z.6	0,361	0,702	VALID
Z.7	0,361	0,642	VALID
Z.8	0,361	0,738	VALID

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (Y) memiliki r hitung $>$ r tabel dengan nilai r tabel 0,361 menyatakan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Z dinyatakan valid. Nilai r tabel diperoleh dari distribusi r tabel dengan signifikansi 5%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (Z) valid dan layak dilanjutkan untuk uji reliabilitas.

4.1.4 Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil suatu pengukuran yang digunakan tetap bersifat terpercaya serta terbebas dari kesalahan pengukuran. Uji reliabilitas juga dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan dapat diandalkan atau bersifat tangguh.

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai *Cronbach's alpha* dengan taraf signifikasi. Apabila hasil dari *Cronbach's alpha* > tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan reliabel dan begitupun sebaliknya. Dalam uji reliabilitas, pertanyaan yang digunakan dalam instrumen harus sudah dilakukan uji validitas dan dinyatakan valid. Apabila hasil dari uji reliabilitas tidak reliabel, maka instrumen dengan variabel tersebut tidak dapat digunakan dalam mendukung penelitian.

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	X	0,811	Reliabel
2	Y	0,801	Reliabel
3	Z	0,832	Reliabel

Sumber: data diolah peneliti

Hasil analisis yang dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach's alpha* menunjukkan bahwa 23 butir soal mempunyai tingkat koefisien *alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen reliabel. Uji reliabilitas yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa variabel Budaya Organisasi memiliki nilai *Cronbach's Alpha* senilai 0,811. Variabel *Good Governance* memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,801 sedangkan nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik menunjukkan nilai sebesar 0,832. Seluruh variabel memiliki hasil *Cronbach's Alpha* > 0,60 yang membuktikan bahwa seluruh item pertanyaan secara konsistensi memiliki reliabilitas.

4.1.5 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk mempeorleh hubungan yang terjadi antara sebab dan akibat dalam suatu variabel. Sebelum melakukan pengujian asumsi

klasik akan dilakukan pengujian terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian dengan teknik uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam uji asumsi klasik terdapat 3 pengujian yang dilakukan yakni uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

4.1.5.1 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya hubungan antara variabel bebas. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi dari hasil multikolinieritas. Berikut tabel hasil pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini.

4.5 Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Budaya_Organisasi	,700	1,429
	Penerapan_ASP	,700	1,429

a. Dependent Variable: Good_Governance

Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya ataupun dari nilai VIF. Apabila nilai tolerance $>0,10$ dan nilai VIF <10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi multikolinieritas dalam penelitian ini terpenuhi atau dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini.

4.1.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dikatakan heteroskedastisitas apabila variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, namun jika variansi residual pengamatan satu ke pengamatan lain tetap maka dinamakan homoskedastisitas. Model regresi yang baik merupakan model regresi yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Oleh karena itu untuk mengetahui variansi residual satu pengamatan ke pengamatan lain agar tidak terjadi heteroskedastisitas dapat dilakukan pengujian dengan Uji Glejser untuk melihat nilai signifikansi seluruh variabel. Pengujian Glejser dilakukan dengan cara mengabsolutkan variabel dependen, lalu meregresinya terhadap variabel independen. Apabila hasil dari pengujian tidak terdapat variabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,821	2,617		-1,078	,286
Budaya_Organisasi	,152	,083	,297	1,839	,072
Penerapan_ASP	-,040	,076	-,084	-,521	,605
Unstandardized Residual	-,042	,101	-,057	-,419	,677

a. Dependent Variable: ABS_TEST

Sumber: Data Diolah SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

4.1.6. Uji *Analysis Path* (Analisis Jalur)

Uji Analisis Jalur digunakan untuk mengetahui seberapa jauh hubungan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara langsung ataupun tidak langsung. Pada penelitian ini akan menguji B seberapa jauh hubungan sebab-akibat antara budaya organisasi terhadap penerapan akuntansi sektor publik, pengaruh budaya organisasi terhadap *good governance*, serta pengaruh budaya organisasi terhadap *good governance* melalui penerapan akauntansi sektor publik.

4.1.6.1 Hasil Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh antara budaya organisasi dengan penerapan akuntansi sektor publik. Hasil analisis dengan bantuan *software* SPSS disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 7 Koefisien Jalur Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,614	4,325		3,147	,003

Budaya Organisasi	,595	,125	,548	4,766	,000
-------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Penerapan_ASP

Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

Berdasarkan output pengujian pada SPSS di atas menunjukkan nilai *standardized beta* budaya organisasi sebesar 0,548 pada taraf signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh pada penerapan akuntansi sektor publik. Besarnya pengaruh yang diberikan budaya organisasi terhadap penerapan akuntansi sektor publik dapat dilihat dari koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengolahan dengan *software* SPSS diperoleh koefisien determinasi budaya organisasi terhadap efisiensi penerapan akuntansi sektor publik sebagai berikut:

Tabel 4.8 Koefisien determinasi Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik

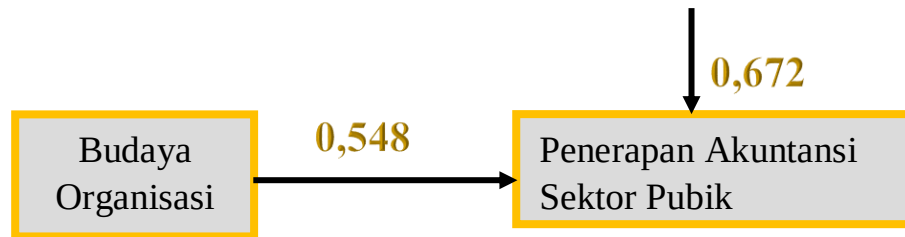
Model Summary					
Model	Change Statistics				
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,300 ^a	22,719	1	53	,000

a. Predictors: (Constant), Budaya_Organisasi

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,300. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya variabel budaya organisasi terhadap penerapan akuntansi sektor publik sebesar 30% sedangkan sisanya sebesar 70% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Sementara itu, untuk mencari nilai $e1$

menggunakan rumus $e1 = (1 - 0,548) = 0,672$. Dengan demikian diperoleh persamaan jalur sebagai berikut:

Gambar 4.1 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik
 $Y = 0,548.X + 0,672$



Hasil analisis untuk hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.4 dengan interpretasi nilai t hasil perhitungan untuk variabel budaya organisasi sebesar 4,766 pada taraf signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan hasil signifikansi yang diperoleh memiliki nilai 0,000 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau $0,05 > 0,000$; maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya analisis jalur adalah signifikan.

4.1.6.2 Hasil Analisis Budaya Organisasi terhadap *Good Governance* melalui Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Dalam penelitian ini diajukan hipotesis 3 yakni terdapat pengaruh langsung serta pengaruh tidak langsung antara budaya organisasi terhadap good governance. Berikut hasil uji analisis menggunakan *software* SPSS untuk mengetahui pengaruh langsung antara budaya organisasi terhadap *good governance*.

Tabel 4.9 Hasil Analisis Koefisien Jalur Budaya Organisasi Terhadap *Good Governance*
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,039	3,649		2,477	,016
Budaya_Organisasi	,602	,105	,617	5,708	,000

a. Dependent Variable: Good_Governance

Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

Nilai *standardized beta* yang diperoleh dari hasil uji variabel budaya organisasi terhadap *good governance* sebesar 0,617 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 , kemudian nilai signifikansi 0,000 tidak lebih daripada nilai probabilitas 0,05 atau $0,05 > 0,000$; maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti analisis jalur adalah signifikan. Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh langsung terhadap *good governance*. Sedangkan besarnya koefisien determinasi yang mempengaruhi *good governance* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi Budaya Organisasi Terhadap Good Governance

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,617 ^a	,381	,369	1,860

a. Predictors: (Constant), Budaya_Organisasi

b. Dependent Variable: Good_Governance

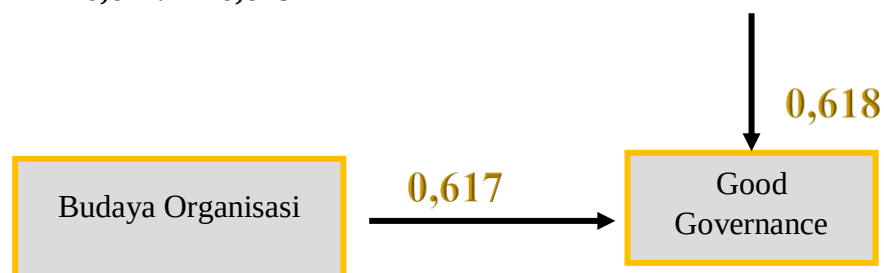
Sumber: (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,381 yang menunjukkan besarnya kontribusi langsung variabel budaya organisasi terhadap *good governance* sebesar 38% sedangkan sisanya merupakan kontribusi variabel lain diluar model regresi ini. Dengan demikian maka

persamaan jalur sub struktur budaya organisasi terhadap good governance diperoleh sebagai berikut:

Gambar 4.2 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap good governance

$$Z = 0,617.X + 0,618$$



4.1.6.3 Hasil Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Good Governance

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh efisiensi penerapan akuntansi sektor publik terhadap good governance. Berdasarkan pengolahan data menggunakan *software* SPSS, diperoleh hasil koefisien jalur sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Analisis Koefisien Jalur Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Good Governance

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,524	3,282		3,207	,002
Penerapan ASP	,564	,096	,629	5,895	,000

a. Dependent Variable: Good_Governance

Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS dapat dilihat bahwa *Standardized beta* efisiensi penerapan akuntansi sektor publik sebesar 0,629

dengan signifikansi pada 0,000. Hal ini merupakan efisiensi penerapan akuntansi sektor publik memiliki pengaruh terhadap *good governance*.

Besarnya pengaruh yang diberikan oleh efisiensi penerapan akuntansi sektor publik terhadap *good governance* dapat terlihat dari hasil analisis koefisien determinasi. Dengan hasil analisis didapatkan koefisien determinasi pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap *Good Governance*

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,629 ^a	,396	,385	1,837

a. Predictors: (Constant), Penerapan_ASP

b. Dependent Variable: Good_Governance

Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 hasil analisis menunjukkan koefisien determinasi (*R square*) memiliki nilai sebesar 0,396 menunjukkan besarnya kontribusi variabel efisiensi penerapan akuntansi sektor publik terhadap *good governance* sebesar 39% sedangkan sisanya merupakan variabel lain di luar penelitian ini. Dari hasil tersebut dapat digambarkan perolehan analisis model jalur di bawah ini.

$$Z = 0,629.X + 0,6090$$

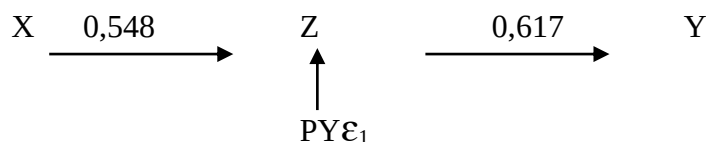
Gambar 4.3 Pengaruh Penerapan Akuntansi terhadap *Good Governance*





Hasil analisis untuk hipotesis 2 terdapat dalam tabel 4.6 memiliki nilai t sebesar 5,895 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 , menunjukkan nilai signifikan 0,000 kurang dari nilai probabilitas 0,05 atau $0,05 > 0,000$; maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa efisiensi penerapan akuntansi sektor publik memiliki pengaruh signifikan terhadap *good governance*.

Setelah mengetahui terdapat pengaruh langsung antara budaya organisasi melalui penerapan akuntansi sektor publik terhadap *good governance*, maka selanjutnya dihitung pengaruh tidak langsung budaya organisasi (X) terhadap *good governance* (Y) melalui penerapan akuntansi sektor publik (Z). Untuk mempermudah maka disusun model lintasan dalam analisis jalur sebagai berikut:



Pengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat tampak pada model lintasan di atas maka diperoleh rumus:

$$PTL (X-Y) = P_1 \times P_2$$

Keterangan:

PT (X-Y) = Pengaruh tidak langsung variabel D terhadap variabel terikat

P_1 = Pengaruh langsung variabel X terhadap Z

P_2 = Pengaruh langsung variabel Z terhadap Y

Dengan demikian dapat dihitung pengaruh tidak langsung variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) melalui variabel intervening (Z) seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

$$PTL (X-Y) = (0,548) \times (0,617) = 0,338$$

Total pengaruh langsung dan total pengaruh tidak langsung yang didapat dari model lintasan jalur:

$$\text{Total pengaruh X-Y} = (0,629) + 0,338 = 0,967$$

Kemudian dari beberapa hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap good governance melalui penerapan akuntansi sektor publik.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Budaya organisasi menurut Edy dalam Shina (2020) didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan, asumsi, norma yang telah lama berlaku disepakati dan diikuti oleh para anggota sebagai pedoman perilaku pemecahan masalah organisasinya.

Hasil penelitian pada hipotesis 1 yakni adanya pengaruh budaya organisasi terhadap efisiensi penerapan akuntansi sektor publik menunjukkan terdapat pengaruh signifikan yang diberikan oleh budaya organisasi terhadap efisiensi akuntansi sektor publik pada SKPD di Kota Nganjuk dengan taraf signifikansi 0,000. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu bahwa budaya organisasi

berpengaruh terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik (Priyatno, Zanuvar 2017) dan sari 2014 pada studi kasus skpd di Kota Medan.

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh budaya organisasi terhadap efisiensi penerapan akuntansi sektor publik adalah 30%. Presentase ini termasuk golongan sedang yang menunjukkan bahwa budaya organisasi memberikan dorongan yang cukup dalam meningkatkan efisiensi penerapan akuntansi sektor publik akan tetapi belum mencapai taraf maksimal seperti yang diharapkan.

Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak terlihat akan tetapi dapat mempengaruhi tindakan dan perilaku orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Tanpa merasakannya, setiap orang bekerja berdasarkan budaya organisasi, namun budaya yang dilakukan tidak sama pada masing-masing daerah. Tidak menjadi masalah apabila budaya pada tiap daerah berbeda-beda karena budaya organisasi yang baik adalah budaya organisasi yang kuat untuk mendorong tujuan daripada organisasi tersebut, begitupun sebaliknya budaya organisasi yang lemah ialah budaya yang bertentangan atau tidak sesuai dengan tujuan organisasi.

Hasil dari budaya organisasi yang kuat dan positif dapat mempengaruhi perilaku pekerja dan efektivitas kinerja. Hal ini sesuai dengan penelitian ini pada hipotesis 1 (pengaruh budaya organisasi terhadap efisiensi penerapan akuntansi sektor publik) yang menyatakan bahwa efisiensi penerapan akuntansi sektor publik dipengaruhi oleh budaya organisasi. Budaya organisasi dapat membentuk pekerja dalam sikapnya untuk mengambil tindakan dan mengambil keputusan.

Dengan demikian, budaya organisasi yang baik dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam menyajikan informasi keuangan, pembentukan pelaporan, hingga informasi akuntansi yang dapat dipercaya.

Jika dilihat menurut variabel lingkungan, organisasi sektor publik bersifat heterogen serta dipengaruhi oleh faktor-faktor penting seperti faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan historis.

Akuntansi keuangan pada pemerintah daerah merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan yang berfokus pada pelaksanaan proses pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada setiap tahun anggaran berjalan.

4.2.2 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap *Good Governance* melalui Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki peran untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Santoso dan Yohanes menemukan bukti bahwa secara teoritis penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara partia maupun secara bersama-sama. Pendapat lainnya diperkuat oeh Kelker yang menyatakan bahwa akuntansi memberikan kerangka dasar yang mempengaruhi kualitas dari *good governance*. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi pada sektor pubik memiliki peran yang sangat penting dalam terciptanya *good governance*.

Tujuan utama akuntansi dalam sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola sesuatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik.

Hasil pengujian pengaruh budaya organisasi terhadap *good governance* menunjukkan nilai R Square sebesar 0,381 yang artinya besaran variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap *good governance* sebesar 38%. Kategori besaran ini termasuk golongan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi kurang mampu dalam meningkatkan *good governance* sehingga belum mencapai pada tingkat maksimal yang diharapkan.

4.2.3 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap *Good Governance*

Hasil pengujian dari hipotesis kedua menyatakan penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap *good governance*. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian yang diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,396 yang berarti sumbangan yang diberikan terhadap *good governance* sebesar 39%. Suatu sistem pemerintahan yang baik adalah yang mampu melaksanakan prinsip-prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem tersebut meliputi: kompetensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, berdasarkan aturan hukum, dan keadilan sosial.

Organisasi sektor publik pada saat ini sedang mendapatkan tuntutan dari masyarakat untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan tuntutan tersebut menjadikan akuntansi dengan cepat diterima serta diakui sebagai ilmu yang utama dalam pengelolaan urusan publik.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat dilakukan oleh sektor swasta, seperti layanan komunikasi, pendidikan, transportasi publik, penarikan pajak dan lain sebagainya. Akan tetapi terdapat tugas tertentu yang hanya dilakukan oleh sektor publik dan tidak dapat digantikan oleh sektor swasta seperti birokrasi pemerintahan. Sehingga terdapat beberapa perbedaan antara sektor publik dengan sektor swasta. Pada prakteknya, sektor swasta yang ada lebih maju dan efisien daripada sektor publik sehingga menjadi tugas untuk sektor publik dalam upayanya memajukan yang dianggap kurang menarik ataupun kurang efisien agar tidak tertinggal dengan sektor swasta.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan data hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan “Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik serta dampaknya terhadap *Good Governance*” antara lain:

1. Budaya organisasi pada SKPD di Kabupaten Nganjuk berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan akuntansi sektor publik. Besarnya kontribusi yang diberikan tergolong sedang yakni sebesar 30%. Kontribusi ini memberikan dampak yang cukup terhadap penerapan akuntansi sektor publik meskipun belum mencapai titik yang diinginkan. Bertanggungjawab atau akuntabilitas merupakan kontrol atas pencapaian hasil pada pelayanan publik yang disampaikan kepada masyarakat secara transparansi atas aktivitas yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pemerintahan yang memenuhi kriteria *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik).
2. Budaya Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap *Good Governance* baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui intervening penerapan akuntansi sektor publik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diberikan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran-saran untuk kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dikembangkan untuk sektor SKPD selain tingkat kecamatan seperti pada tingkat Kabupaten atau Kelurahan.
2. Menambah variabel yang digunakan dalam penelitian
3. Mencari hubungan atau timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah
4. Melibatkan masyarakat sebagai responden dalam penelitian dalam kontribusi menjadikan negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Dian Ratnasari. (2018). *EVALUASI KINERJA ATAS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK SKRIPSI*.

Sari, E. N. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 12(No. 2), 25–54.

Aditya, Bella Gita. (2020). **Pengaruh Biaya Lingkungan, Kinerja Lingkungan dan ISO 14001 terhadap Tingkat Profitabilitas, Skripsi**. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Halim, Abdul., Kusufi, Muhammad Syam. 2016. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.nganjukkab.go.id>, diakses 30 Juli 2021, dari <https://www.nganjukkab.go.id/home/kabar>

<http://www.bpkb.go.id>, diakses pada 30 Juli 2021, dari <http://www.bpkp.go.id/berita/readunit/26/15993/10/Tingkatkan-Tata-Kelola-Pemerintahan-Pemkab-Nganjuk-Gandeng-BPKP-Jawa-Timur>

Mailoor, Herbert, Sondakh, dan Gamaliel. "Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud)." *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"* 8.2 (2017). Diakses pada tanggal 24 Juli 2021 dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/17175/16723>

Manengal, Florensia. "Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999". Diperoleh tanggal 28 Juni 2021 dari https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:uuc0H_BQkH8J:scholar.google.com/+KONSEP+PENYELENGGARAAN+TATA+PEMERINTAHAN+YANG+BAIK&hl=id&as_sdt=0,5

Ngusmanto. 2017. *"Teori Perilaku Organisasi Publik"*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Prabawa, Karamoy, and Mawikere. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa)." *GOING CONCERN: JURNAL*

- RISET AKUNTANSI* 15.2 (2020): 269-278. Diakses pada tanggal 22 Juli dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/28232>
- Priyatno, Zanuar, Diana, dan Afifudin. "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Malang)." *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 6.09 (2017). Diakses pada tanggal 28 Juni 2021 dari <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/378/420>
- Rasul, Sjahruddin. (2017). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal*, 538-539.
- Raheni, Ni Putu Rika, IGAM Asri Dwija Putri, "Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi pada Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kota Denpasar". *E-Jurnal Akuntansi* 28.2 (2019) : 1295-1322.
- Ridwan, Muhammad., Mus'id. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris pada Dinas-dinas di Kota Jambi)". Diperoleh tanggal 28 Juni 2021 dari <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRAT/article/view/6164>.
- Santoso, Urip., Pambelum, Yohanes Joni. "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah *Fraud*". Diperoleh tanggal 29 Juni 2021 dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/article/view/363/347>.
- Samsu, 2017. *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Pustaka: Jambi.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarmo, Agus Sunarmo, et al. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi SDM Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah". *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 16.1 (2018): 9-18.2021. Diakses pada tanggal 24 Juli 2021 dari <http://journal.unimma.ac.id/index.php/bisnisekonomi/article/view/2126>
- Sofyan, Azhari, Zirman, and Syafrion, Fandra Yovano. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok)". Diss. Riau University, 2015. Diakses pada tanggal 20 Juli 2021 dari

<https://media.neliti.com/media/publications/34103-ID-pengaruh-sistem-pengendalian-intern-pengelolaan-keuangan-daerah-komitmen-organisasi.pdf>

Yusniyar, Darwis, dan Abdullah, S. 2016. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern terhadap Good Governance dan Dampaknya pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPA Pemerintah Aceh)". Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Vol. 5:100-115. Diakses pada tanggal 22 Juli 2021 dari <http://e-repository.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4514>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER TUGAS AKHIR

Dalam rangka melengkapi data yang diperlukan untuk memenuhi tugas akhir, bersama ini peneliti menyampaikan kuesioner mengenai “Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efisiensi Penerapan Akuntansi Sektor Publik serta Dampaknya terhadap *Good Governance*”. Adapun hasil dari kuesioner ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan tugas akhir sehingga segala informasi yang ada hanya digunakan oleh kepentingan penelitian dan data yang diperoleh akan dijamin kerahasiaannya.

Peneliti mengucapkan beribu terimakasih kepada responden yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini. Semoga segala perbuatan baik senantiasa dibalas oleh Alloh SWT. Dengan berlipat ganda.

Berikut adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efisiensi Penerapan Akuntansi Sektor Publik serta Dampaknya terhadap *Good Governance*.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jabatan :

Asal kecamatan :

Skor	Keterangan
5	Sangat Setuju
4	Setuju
3	Ragu-ragu
2	Tidak Setuju
1	Sangat Tidak Setuju

Berikan tanda centang (√) pada salah satu kolom jawaban yang sudah tersedia

No.	Pernyataan	Penilaian				
		1	2	3	4	5
Budaya Organisasi						
1.	Pimpinan telah memberikan wewenang kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan instansi pemerintah					

2.	Pimpinan menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai					
3.	Petugas aparaturn menjalankan tugas sesuai dengan amanat yang diberikan serta dapat dipertanggungjawabkan					
4.	Selalu bekerja berdasarkan etika dan sesuai kode etik aparaturn pemerintahan					
5.	Memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang ada					
6.	Bertindak dan berperilaku sesuai dengan ucapan dan perbuatan					
7.	Memiliki sifat pekerja keras, taat terhadap asas berjiwa kreatif dan inovatif serta mempunyai kualifikasi di bidang masing-masing					
8.	Menerima dan memberi kritik secara terbuka					
Good Governance						
1.	Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung atau tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat meyalurkan aspirasinya					
2.	Bertanggungjawab kepada public atas seluruh aktivitas yang dilakukan					
3.	Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan dan diperoleh secara langsung					
4.	Mampu menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dengan baik					
5.	Memberikan informasi yang akurat terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat					

6.	Masyarakat dengan mudah mengetahui serta memperoleh informasi data dan informasi tentang kebijakan, program serta kegiatan aparatur pemerintah yang dilaksanakan baik ditingkat pusat ataupun daerah					
7.	Melakukan tindak lanjut atas segala temuan pelanggaran hukum					
Penerapan Akuntansi Sektor Publik						
1.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah disusun dengan jelas sehingga mudah dipahami					
2.	Laporan keuangan yang dibuat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti					
3.	Informasi yang disajikan dari hasil laporan keuangan SKPD disusun dengan menggambarkan transaksi dan peristiwa yang sebenarnya					
4.	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian yang akan datang					
5.	Laporan keuangan SKPD menghasilkan informasi secara lengkap yang mencakup seluruh informasi akuntansi dan dapat digunakan dalam mengambil keputusan					
6.	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan telah memenuhi kebutuhan dari para pengguna laporan keuangan pemerintah					
7.	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan SKPD tidak berpihak pada kepentingan tertentu					
8.	Melakukan administrasi penyelenggaraan Negara yang					

	berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal					
--	---	--	--	--	--	--

Lampiran 2. Rekap Data Jawaban Kuesioner

1. Data Variabel Budaya Organisasi

NO	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8
1	5	5	5	5	5	5	5	5
2	5	4	4	5	5	4	4	4
3	5	5	5	5	4	4	4	4
4	4	5	5	4	4	4	5	4
5	5	4	4	4	4	4	5	4
6	4	4	4	3	4	4	3	3
7	4	4	5	4	5	5	4	5
8	4	4	4	4	5	5	5	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	5	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	5	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	5	5	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4
20	5	5	5	4	4	5	4	5
21	4	4	4	5	5	4	4	4
22	5	5	5	5	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	5
24	5	4	4	5	5	5	4	4
25	5	5	4	4	4	4	4	5
26	4	4	4	4	4	4	4	4
27	5	5	5	5	5	5	5	5
28	4	4	4	4	4	4	4	4
29	5	5	4	4	4	5	4	5
30	5	5	5	4	4	4	5	5
31	5	5	4	4	4	4	4	5
32	4	4	4	4	4	4	5	4
33	5	5	4	4	5	5	4	5
34	5	4	4	5	4	5	4	4
35	4	4	4	4	4	4	5	5
36	5	5	5	5	5	5	4	4
37	5	4	4	4	4	4	4	5
38	5	4	4	4	5	4	4	4

39	4	4	4	4	5	5	5	4
40	5	5	5	5	5	5	5	5
41	4	4	4	4	5	5	4	5
42	5	5	5	5	4	4	4	5
43	5	5	5	5	5	5	5	5
44	4	5	4	5	4	4	4	5
45	4	4	4	4	4	4	5	4
46	5	5	4	4	4	4	4	5
47	5	4	5	4	4	4	4	4
48	5	5	5	5	5	5	5	5
49	5	5	5	5	5	4	4	4
50	4	4	4	4	4	4	5	5
51	5	5	5	5	5	5	5	5
52	5	5	5	5	5	4	5	5
53	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	5	4	4	5
55	4	4	5	5	4	4	4	4

2. Data Variabel *Good Governance* (Y)

NO	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7
1	5	5	5	5	5	5	5
2	4	4	5	4	4	4	4
3	4	4	4	5	5	4	4
4	4	4	2	4	5	4	4
5	4	4	4	5	4	4	4
6	4	3	4	4	4	3	4
7	4	5	5	5	5	5	4
8	4	5	4	4	4	5	5
9	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	2	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4
13	5	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	5	5	5	4	5

21	4	4	4	5	4	4	4
22	4	5	4	4	4	4	5
23	5	4	4	4	4	5	5
24	4	4	5	4	4	5	5
25	4	4	5	5	5	5	4
26	4	4	4	4	4	4	4
27	5	5	5	5	5	5	4
28	4	4	4	4	4	4	4
29	5	5	4	5	5	4	4
30	5	5	4	5	5	5	4
31	4	4	4	4	4	5	4
32	4	4	4	5	4	4	4
33	5	4	5	5	5	4	4
34	5	4	5	5	5	5	5
35	4	5	4	4	5	5	4
36	5	5	5	5	4	4	5
37	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	5	4	5	5
39	4	4	4	4	5	5	5
40	4	5	5	5	5	4	4
41	4	4	5	5	4	5	4
42	5	5	4	4	5	4	5
43	5	5	5	5	5	5	5
44	4	4	4	4	5	4	5
45	5	5	5	4	4	4	4
46	4	4	4	5	5	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4
48	5	5	5	5	5	5	5
49	4	4	4	4	5	4	5
50	5	5	5	4	4	4	4
51	5	5	5	5	5	5	5
52	5	5	5	5	5	5	5
53	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4
55	5	5	4	4	4	4	5

3. Data Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (Z)

NO	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8
1	5	5	5	5	5	5	5	5
2	4	4	4	4	4	4	4	4

3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	5	4
5	4	4	4	4	4	4	5	5
6	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	5	5	5	5	5	5	5
8	5	5	4	5	4	5	5	5
9	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	5	5	4	5	5
14	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	5	4
21	4	4	4	4	5	5	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4
23	5	5	5	4	4	4	4	4
24	5	5	4	4	5	4	4	4
25	4	4	5	5	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4
27	5	5	4	4	5	5	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4
29	5	5	5	5	4	4	4	4
30	5	4	4	4	5	4	4	4
31	5	5	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4
33	5	5	5	4	4	4	5	5
34	4	4	4	4	4	4	4	4
35	5	4	4	5	4	5	4	4
36	5	5	4	5	5	5	4	5
37	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	5	5	4	4	4	4
39	5	5	4	5	4	5	4	4
40	4	4	4	5	4	4	4	5
41	4	4	4	5	5	5	4	4
42	4	5	5	4	4	5	4	4
43	5	5	5	5	5	5	5	5

44	5	5	5	5	4	4	4	4
45	5	5	4	4	4	5	5	5
46	4	4	5	5	5	4	4	4
47	5	4	5	4	4	4	4	4
48	5	5	5	5	5	5	5	5
49	4	5	4	4	5	5	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4	4
51	5	5	5	4	4	4	5	4
52	5	5	5	5	4	5	5	5
53	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4
55	5	4	4	4	4	5	4	4

Lampiran 3. Output SPSS 23

1. Uji Validitas

a. Budaya Organisasi (X)

Correlations									
	X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	TOTAL
X01 Pearson Correlation	1	.639**	.420**	.467**	.308*	.356**	.144	.388**	.712**
Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.022	.008	.296	.003	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
X02 Pearson Correlation	.639**	1	.540**	.425**	.187	.294*	.230	.508**	.733**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.171	.029	.091	.000	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
X03 Pearson Correlation	.420**	.540**	1	.556**	.246	.265	.277*	.216	.669**
Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.071	.051	.041	.114	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
X04 Pearson Correlation	.467**	.425**	.556**	1	.436**	.297*	.229	.191	.688**
Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.001	.027	.093	.162	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
X05 Pearson Correlation	.308*	.187	.246	.436**	1	.629**	.301*	.247	.630**
Sig. (2-tailed)	.022	.171	.071	.001		.000	.025	.069	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
X06 Pearson Correlation	.356**	.294*	.265	.297*	.629**	1	.300*	.350**	.654**
Sig. (2-tailed)	.008	.029	.051	.027	.000		.026	.009	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
X07 Pearson Correlation	.144	.230	.277*	.229	.301*	.300*	1	.357**	.538**
Sig. (2-tailed)	.296	.091	.041	.093	.025	.026		.007	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
X08 Pearson Correlation	.388**	.508**	.216	.191	.247	.350**	.357**	1	.629**
Sig. (2-tailed)	.003	.000	.114	.162	.069	.009	.007		.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
TOTAL Pearson Correlation	.712**	.733**	.669**	.688**	.630**	.654**	.538**	.629**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55

b. Good Governance (Y)

Correlations

	y01	y02	y03	y04	y05	y06	y07	total
y01 Pearson Correlation	1	.610**	.411**	.337*	.337*	.295*	.372**	.698**
Sig. (2-tailed)		.000	.002	.012	.012	.029	.005	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55
y02 Pearson Correlation	.610**	1	.380**	.312*	.386**	.418**	.344*	.720**
Sig. (2-tailed)	.000		.004	.020	.004	.001	.010	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55
y03 Pearson Correlation	.411**	.380**	1	.488**	.256	.380**	.268*	.705**
Sig. (2-tailed)	.002	.004		.000	.060	.004	.048	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55
y04 Pearson Correlation	.337*	.312*	.488**	1	.545**	.386**	.142	.680**
Sig. (2-tailed)	.012	.020	.000		.000	.004	.300	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55
y05 Pearson Correlation	.337*	.386**	.256	.545**	1	.386**	.301*	.665**
Sig. (2-tailed)	.012	.004	.060	.000		.004	.026	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55
y06 Pearson Correlation	.295*	.418**	.380**	.386**	.386**	1	.421**	.690**
Sig. (2-tailed)	.029	.001	.004	.004	.004		.001	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55
y07 Pearson Correlation	.372**	.344*	.268*	.142	.301*	.421**	1	.586**
Sig. (2-tailed)	.005	.010	.048	.300	.026	.001		.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55
total Pearson Correlation	.698**	.720**	.705**	.680**	.665**	.690**	.586**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	55	55	55	55	55	55	55	55

c. Penerapan Akuntansi Sektor Publik (Z)

Correlations

	Z01	Z02	Z03	Z04	Z05	Z06	Z07	Z08	TOTAL
Z01 Pearson Correlation	1	.723**	.386**	.312*	.202	.431**	.291*	.333*	.693**
Sig. (2-tailed)		.000	.004	.020	.139	.001	.031	.013	.000
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Z02 Pearson Correlation	.723**	1	.500**	.341*	.316*	.545**	.406**	.449**	.799**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.011	.019	.000	.002	.001	.000

	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Z03	Pearson Correlation	.386**	.500**	1	.474**	.140	.147	.332*	.270*	.603**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000		.000	.309	.284	.013	.047	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Z04	Pearson Correlation	.312*	.341*	.474**	1	.369**	.438**	.276*	.504**	.686**
	Sig. (2-tailed)	.020	.011	.000		.006	.001	.041	.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Z05	Pearson Correlation	.202	.316*	.140	.369**	1	.492**	.194	.328*	.554**
	Sig. (2-tailed)	.139	.019	.309	.006		.000	.156	.015	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Z06	Pearson Correlation	.431**	.545**	.147	.438**	.492**	1	.303*	.437**	.702**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.284	.001	.000		.024	.001	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Z07	Pearson Correlation	.291*	.406**	.332*	.276*	.194	.303*	1	.742**	.642**
	Sig. (2-tailed)	.031	.002	.013	.041	.156	.024		.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Z08	Pearson Correlation	.333*	.449**	.270*	.504**	.328*	.437**	.742**	1	.738**
	Sig. (2-tailed)	.013	.001	.047	.000	.015	.001	.000		.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
TOTAL	Pearson Correlation	.693**	.799**	.603**	.686**	.554**	.702**	.642**	.738**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55

2. Uji Reliabilitas

a. Budaya Organisasi (X)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.811	8

b. Good Governance (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
------------------	------------

.801	7
------	---

c. Penerapan Akuntansi Sektor Publik (Z)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.832	8

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Budaya_Organisasi	,700	1,429
	Penerapan_ASP	,700	1,429

b. Dependent Variable: Good_Governance

Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

b. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,821	2,617		-1,078	,286
	Budaya_Organisasi	,152	,083	,297	1,839	,072
	Penerapan_ASP	-,040	,076	-,084	-,521	,605
	Unstandardized Residual	-,042	,101	-,057	-,419	,677

b. Dependent Variable: ABS_TEST

Sumber: Data Diolah SPSS, 2023

4. Uji *Analysis Path* (Analisis Jalur)

a. Hasil Analisis Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,614	4,325		3,147	,003
Budaya_Organisasi	,595	,125	,548	4,766	,000

b. Dependent Variable: Penerapan_ASP

Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

b. Hasil Analisis Budaya Organisasi terhadap *Good Governance* melalui Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,039	3,649		2,477	,016
Budaya_Organisasi	,602	,105	,617	5,708	,000

c. Dependent Variable: Good_Governance

Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

c. Hasil Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap *Good Governance*

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,524	3,282		3,207	,002
Penerapan_ASP	,564	,096	,629	5,895	,000

c. Dependent Variable: Good_Governance

Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk 64412
 Telp/Fax (0358) 328079 e-mail : kesbangpolkab.nganjuk@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 072/ 188 /411.700/2021

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tanggal 23 Nopember 2021
 Nomor : B-1302/FEK.MPP.00.9/11/2021 Perihal Ijin Penelitian Skripsi.

Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : HALIMATUR RODIYAH
 Status : Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 Alamat : Jalan Gajayana 50 Malang.
 Untuk Keperluan : Ijin Penelitian.
 Judul/Tema : “ PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFISIENSI PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP GOOD GOVERNANCE “.

Lokasi Kegiatan : Kecamatan se Kabupaten Nganjuk.
 Lama Kegiatan : 2 (dua) bulan
 Pengikut dalam Kegiatan : -

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Menjaga tata tertib, mematuhi Protokol Kesehatan (memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir) keamanan, kesopanan, dan kesucilaan serta menghindari dari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat ;
3. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
5. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil kegiatan maupun temuan-temuan yang ada didalamnya, melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Disampaikan Kepada Yth
 Camat Se Kabupaten Nganjuk..

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nganjuk (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
- 4. Halimatur Rodiyah

Nganjuk, 22 Desember 2021
 KEPALA KANTOR KESBANGPOL
 KABUPATEN NGANJUK



Drs. GATUT, SUGIARTO, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690508 198903 1 002

Lampiran 5. Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraidah, M.S.A
NIP : 197612102009122001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Halimatur Rodliyah
NIM : 17520025
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : **Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efisiensi Penerapan Akuntansi Sektor Publik serta dampaknya terhadap Good Governance**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
10%	12%	7%	5%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 September 2025

UP2M



Zuraidah, M.S.A

Lampiran 6. Bukti Konsultasi

6/21/23, 4:38 PM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 17520025
Nama : Halimatur Rodliyah
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A
Judul Skripsi : PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFISIENSI PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP GOOD GOVERNANCE

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	24 Februari 2021	Pengajuan SK Bimbingan Skripsi	Genap 2020/2021	Sudah Dikoreksi
2	28 Juni 2021	Bimbingan Proposal Skripsi	Genap 2020/2021	Sudah Dikoreksi
3	29 Juni 2021	Revisi Proposal Skripsi	Genap 2020/2021	Sudah Dikoreksi
4	1 Juli 2021	Revisi Bab III tentang Operasional Variabel	Ganjil 2021/2022	Sudah Dikoreksi
5	2 Juli 2021	ACC untuk Seminar Proposal Skripsi	Ganjil 2021/2022	Sudah Dikoreksi
6	16 Juli 2021	Seminar Proposal Skripsi	Ganjil 2021/2022	Sudah Dikoreksi
7	31 Agustus 2021	Konsultasi Kuesioner Penelitian	Ganjil 2021/2022	Sudah Dikoreksi
8	31 Agustus 2021	Konsultasi Kuesioner Penelitian	Ganjil 2021/2022	Sudah Dikoreksi
9	30 Maret 2022	Konsultasi penyebaran angket	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
10	16 Juni 2023	Konsultasi Skripsi Bab4-5	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
11	18 Juni 2023	ACC Skripsi Keseluruhan	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

Malang, 18 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Fatmawati Zahroh, M.S.A

Lampiran 7. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Halimatur Rodliyah
 Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 07 Februari 1999
 Alamat Asal : Dusun Jimbir, RT 03 RW 09 Desa Sugihwaras,
 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk
 Alamat Malang : Jl. Gajayana No. 50 Malang
 Telepon/HP : 085812425887
 E-Mail : rodliyahhalimatur@gmail.com

Pendidikan Formal

2004-2005 : TK Pertiwi I
 2005-2011 : SDN 1 Sugihwaras
 2011-2014 : SMPN 1 Tanjunganom
 2014-2017 : SMAN 1 Tanjunganom

Pendidikan Non Formal

2011-2017 : Pondok Pesantren Al-Fattah Pule Tanjunganom
 2017-2018 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly Malang